

**RENCANA STRATEGIS**  
**(RENSTRA)**  
**2025-2029**



**SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN KUBU RAYA**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu tertentu yang bersifat teknis operasional dan berfungsi sebagai acuan operasional di dalam terwujudnya perencanaan pembangunan sebagaimana yang dikehendaki.

Oleh sebab itu Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya mempunyai maksud dan tujuan sebagai implementasi atau penjabaran dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu kedepan.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 ini menjabarkan program dan kegiatan yang merupakan prioritas bagi Sekretariat Daerah dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kubu Raya. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini tidak akan dapat tersusun tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Disadari bahwa Penyusunan Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, tetapi mudah-mudahan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam upaya meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Akhir kata semoga Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 ini dapat terlaksana sesuai harapan dan tahapan yang telah dilalui serta memberi manfaat bagi peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Sungai Raya, 19 September 2025

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUBU RAYA**

  
**YUSRAN ANIZAM, S.Sos, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 196906301989031005**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	I
DAFTAR ISI .....	II
DAFTAR TABEL .....	III
DAFTAR GAMBAR .....	V
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. LANDASAN HUKUM .....	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN .....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>9</b>
2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....	9
2.1.1. Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah .....	9
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	22
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	27
2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan .....	44
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan ...	45
2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .	45
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	46
2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah .....	54
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>57</b>
3.1. TUJUAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 .....	58
3.2. SASARAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 .....	58
3.3. STRATEGI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 .....	60
3.4. ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 ..	61
3.5. CASSCADING KINERJA TAHUN 2025-2029 .....	64
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>68</b>
4.1. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR KINERJA, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF .....	68
4.2. TARGET KINERJA RENCANA STRATEGIS 2025-2029 .....	107
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>110</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan Bezetting dan Kebutuhan Sumber Daya Aparatur (PNS dan PPPK) .....	22
Tabel 2.2	Sumber Daya Aparatur (PNS dan PPPK) Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	23
Tabel 2.3	Sumber Daya Aparatur (PNS dan PPPK) Berdasarkan Pangkat /Golongan .....	24
Tabel 2.4	Sumber Daya Aparatur (PNS dan PPPK) Berdasarkan Jabatan /Eselon .....	25
Tabel 2.5	Sumber Daya Aparatur (PNS dan PPPK) Berdasarkan Jenis Kelamin .....	26
Tabel 2.6	Rekapitulasi Barang ke Neraca .....	27
Tabel 2.7	Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Periode 2019-2024 .....	28
Tabel 2.8	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Periode Rencana Strategis Tahun 2019-2024 .....	30
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Periode Rencana Strategis Tahun 2019-2024 .....	32
Tabel 2.10	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya .....	47
Tabel 2.11	Perumusan Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya .....	55
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya .....	59
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, dan Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya .....	60
Tabel 3.3	Perumusan Arah Kebijakan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya .....	62
Tabel 3.4	Cascading Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	65
Tabel 3.5	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya .....	66
Tabel 4.1	Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten .....	69
Tabel 4.2	Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya .....	90



Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	100
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2030 .....	108
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Daerah Tahun 2025-2030 .....	108
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025-2030 .....	108
Tabel 4.7	Formulasi Indikator Kinerja Kunci .....	109



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya .....	10
Gambar 2.2	Grafik Perbandingan Bezzetting dan Kebutuhan Sumber Daya Aparatur (PNS dan PPPK) .....	23
Gambar 2.3	Grafik Sumber Daya Aparatur (PNS dan PPPK) Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	23
Gambar 2.4	Grafik Sumber Daya Aparatur (PNS dan PPPK) Berdasarkan Pangkat/Golongan .....	24
Gambar 2.5	Grafik Sumber Daya Aparatur (PNS dan PPPK) Berdasarkan Jabatan/Eselon .....	25
Gambar 2.6	Grafik Sumber Daya Aparatur (PNS dan PPPK) Berdasarkan Jenis Kelamin .....	26



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun tertentu. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus ditempuh oleh setiap Perangkat Daerah dalam menjawab tuntutan lingkungan dan perkembangan wilayah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang diembannya.

Renstra memiliki peran yang sangat penting untuk menuntun Perangkat Daerah dalam memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki. Renstra menjadi kunci yang akan menunjukkan penjabaran kebijakan melalui rencana-rencana yang sangat prioritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, karena itu rencana-rencana dimaksud disertai dengan target yang harus dipenuhi dan dipertanggung jawabkan pencapaiannya, sehingga secara nyata kebijakan yang diambil dapat diketahui pula pencapaiannya, dengan demikian penyelenggaraan Pemerintahan dapat berjalan secara akuntabel.

Sejalan dengan itu penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa menjadi cita-cita dan harapan setiap warga negara, tuntutan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik “*Good Governance*” yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, efisien dan efektif yakni dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara pemerintah, sektor



swasta dan masyarakat. Dengan demikian pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu mempertanggung jawabkan segala sikap, prilaku dan kebijakan yang dibuat baik secara politik, hukum, maupun ekonomi dan di informasikan secara terbuka kepada publik.

Untuk mewujudkan *Clean and Good Governance* merupakan tantangan yang harus dipenuhi oleh pemerintah sehingga keinginan masyarakat terhadap pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat menjadi kenyataan. Langkah yang perlu dan harus dikembangkan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan legitimasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam rangka itu, cara pengelolaan pemerintah dan pembangunan yang perlu dilakukan adalah membangun perubahan secara bersama-sama baik perubahan sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat. Perwujudan *good governance* dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Kubu Raya, memerlukan tenaga yang memiliki kompetensi dan profesionalisme serta kinerja yang tinggi. Seluruh pegawai Sekretariat Daerah harus merespon perubahan lingkungan dan perkembangan wilayah yang demikian cepat, mampu menanggapi reformasi agar kesan masyarakat maupun kalangan swasta yang sering menilai birokrasi pemerintah sebagai birokrasi yang tidak efisien, lamban serta korup tidak lagi terjadi.

Proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- d. penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar, antara lain:

- a. kemana pelayanan perangkat daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai;
- b. bagaimana mencapainya; dan
- c. langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.



## 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan



- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);



17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barta Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
30. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);



33. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 43);
34. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
35. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 10).

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Tujuan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman umum bagi segenap pimpinan dan staf Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dalam menyusun kebijakan program, dan kegiatan yang berkaitan bidang perencanaan pembangunan daerah.

Adapun tujuan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam setiap tahunnya.
3. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4. Menjamin terwujudnya konsistensi dan sinergis antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam Penulisan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 terdiri dari:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang latar belakang penyusunan rencana strategis, dasar hukum penyusunan,



maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan penyusunan rencana strategis.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menggambarkan struktur organisasi, serta menjabarkan tugas dan fungsi masing-masing bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya. Selain itu, digambarkan pula kondisi sumber daya manusia berdasarkan klasifikasinya serta sarana dan prasarana yang terdapat di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya. Kemudian dijelaskan tentang kinerja pelayanan Sekretariat Daerah yang telah dicapai pada periode sebelumnya dan capaian kinerja dan keuangan yang telah dicapai pada periode yang telah berlalu serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya. Didalam bab ini juga berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah dan penentuan isu-isu strategis.

## BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi penjelasan tentang tujuan dan sasaran sesuai tugas, pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya serta indikator kinerja dan target yang digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah dirumuskan agar terdapat kesamaan persepsi bagi para pengguna dalam memahami substansi dokumen rencana strategis. Bab ini juga menerangkan tentang strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya mendatang.

## BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan tentang rumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan penetapan rencana kinerja berdasarkan urusan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

## BAB V PENUTUP

Bab penutup ini berisi uraian kesimpulan dan harapan pemanfaatan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.



## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya, yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Mempawah. Tujuan utama pemekaran Kabupaten ini adalah agar kesejahteraan masyarakat dapat cepat terwujud dengan memperlancar pelayanan terhadap masyarakat dengan mendekatkan pusat kekuasaan pada wilayah-wilayah yang melingkupi kabupaten ini. Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya merupakan perangkat daerah melaksanakan kewenangan otonomi dalam rangka pelaksanaan tugas yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

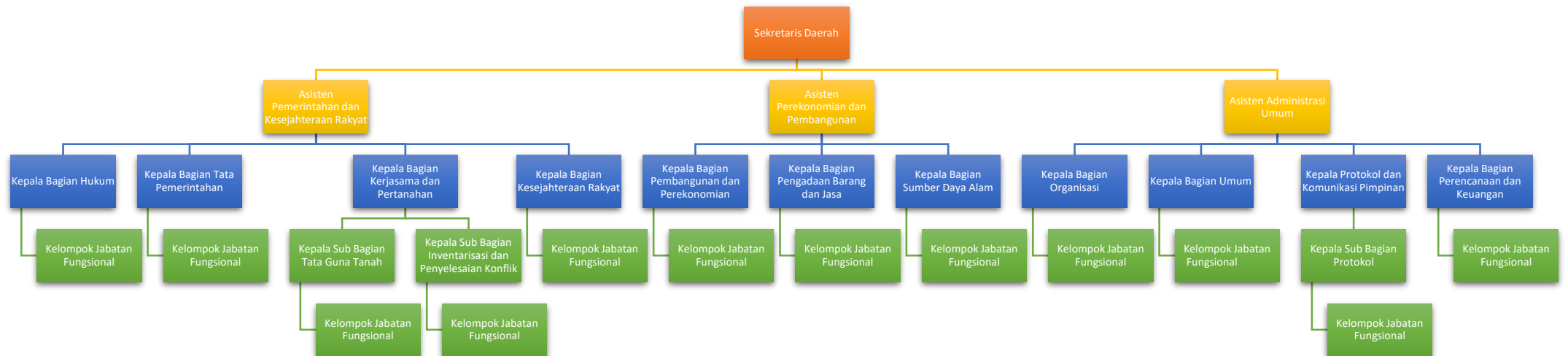
Dalam rangka penyesuaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, maka Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 55 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 dirubah kedalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 107 Tahun 2019 tanggal 16 Desember 2019 dan dirubah kembali dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 55 Tahun 2021 tanggal 19 Oktober 2021 akibat dari Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 107 Tahun 2019 tanggal 16 Desember 2019 yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah, dengan tugas pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, asisten dan staf ahli serta pelayanan administratif.

#### 2.1.1. Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, bahwa tugas, fungsi, dan struktur perangkat daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya dapat dijabarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Bagan Struktur Organisasi**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya**



Sumber: Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya



**Sekretaris Daerah dibantu 3 (tiga) asisten, yaitu:**

**1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi 4 (empat) Bagian, yaitu:

- a. Bagian Tata Pemerintahan
- b. Bagian Hukum
- c. Bagian Kerjasama dan Pertanahan dengan 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:
  - Sub Bagian Tata Guna Tanah
  - Sub Bagian Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik
- d. Bagian Kesejahteraan Rakyat

**2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan**

Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi 3 (tiga) Bagian, yaitu:

- a. Bagian Pembangunan dan Perekonomian
- b. Bagian Sumber Daya Alam
- c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

**3. Asisten Administrasi Umum**

Asisten Administrasi Umum membawahi 4 (empat) Bagian, yaitu:

- a. Bagian Organisasi
- b. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan 1 (satu) Sub Bagian, yaitu:
  - Sub Bagian Protokol
- c. Bagian Perencanaan dan Keuangan
- d. Bagian Umum

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 55 Tahun 2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

**a. SEKRETARIS DAERAH**

**Tugas Pokok**

Sekretaris Daerah adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan serta melaporkan



kegiatan Sekretariat Daerah berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan.

### **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah, Asisten dan Staf Ahli;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
- e. Penyelenggaraan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **b. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

### **Tugas pokok**

Membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas koordinasi, perumusan, pembinaan, pengarahan, penyelenggaraan dan evaluasi kebijakan daerah di Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum serta Bagian Kerjasama dan Pertanahan.

### **Fungsi**

- a. Penyusunan kebijakan daerah di Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum serta Kerjasama dan Pertanahan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum serta Kerjasama dan Pertanahan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas SKPD di Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum serta Kerjasama dan Pertanahan;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum serta Kerjasama dan Pertanahan;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak



yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum serta Kerjasama dan Pertanahan; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum serta kerjasama dan pertanahan.

**c. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**

**Tugas Pokok**

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan serta otonomi daerah.

**Fungsi**

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Tata Pemerintahan;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Tata Pemerintahan sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan serta otonomi daerah;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendali kegiatan di Bagian Tata Pemerintahan;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Tata Pemerintahan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**d. BAGIAN HUKUM**

**Tugas Pokok**

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi.

**Fungsi**

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Hukum;



- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Hukum sesuai lingkup tugasnya;
  - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
  - d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. Pengendalian kegiatan di Bagian Hukum;
  - f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Hukum; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. BAGIAN KERJASAMA DAN PERTANAHAN**

**Tugas Pokok**

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas kerjasama dalam negeri, luar negeri dan evaluasi, tata guna tanah serta inventarisasi dan penyelesaian konflik.

**Fungsi**

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Kerjasama dan Pertanahan;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Kerjasama dan Pertanahan sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Kerjasama dalam negeri, luar negeri dan evaluasi, tata guna tanah serta inventarisasi dan penyelesaian konflik;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bagian Kerjasama dan Pertanahan;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Kerjasama dan Pertanahan; dan



- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**f. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

**Tugas Pokok**

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

**Fungsi**

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**g. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**

**Tugas Pokok**

Membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas koordinasi, perumusan, pembinaan, pengarahan, penyelenggaraan dan evaluasi kebijakan daerah di Bagian Pembangunan dan Perekonomian, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta Bagian Sumber Daya Alam.

**Fungsi**

- a. Penyusunan kebijakan daerah di Bagian Pembangunan dan Perekonomian, Pengadaan Barang dan Jasa serta Sumber Daya Alam;



- b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di Bagian Pembangunan dan Perekonomian, Pengadaan Barang dan Jasa serta Sumber Daya Alam;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas SKPD di Bagian Pembangunan dan Perekonomian, Pengadaan Barang dan Jasa serta Sumber Daya Alam;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bagian Pembangunan dan Perekonomian, Pengadaan Barang dan Jasa serta Sumber Daya Alam;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di Bagian Pembangunan dan Perekonomian, Pengadaan Barang dan Jasa serta Sumber Daya Alam; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang pembangunan dan perekonomian, pengadaan barang dan jasa serta sumber daya alam yang berkaitan dengan tugasnya.

**h. BAGIAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN**

**Tugas Pokok**

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang administrasi pembangunan, pembinaan BUMD, BLUD, perencanaan dan pengawasan usaha mikro, serta pengendalian dan distribusi perekonomian.

**Fungsi**

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Pembangunan dan Perekonomian;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Pembangunan dan Perekonomian sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi pembangunan, pembinaan BUMD, BLUD, perencanaan dan pengawasan usaha mikro, serta pengendalian dan distribusi perekonomian;



- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bagian Pembangunan dan Perekonomian;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Pembangunan dan Perekonomian; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**i. BAGIAN SUMBER DAYA ALAM**

**Tugas Pokok**

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam energi dan air.

**Fungsi**

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Sumber Daya Alam;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Sumber Daya Alam sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam energi dan air;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bagian Sumber Daya Alam;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Sumber Daya Alam; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**j. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

**Tugas Pokok**

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan LPSE, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.



### **Fungsi**

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan LPSE, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **k. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**

#### **Tugas Pokok**

Membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas koordinasi, perumusan, pembinaan, pengarahan, penyelenggaraan dan evaluasi kebijakan daerah di Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta Bagian Perencanaan dan Keuangan.

#### **Fungsi**

- a. Penyusunan kebijakan daerah di Bagian Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta Perencanaan dan Keuangan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di Bagian Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta Perencanaan dan Keuangan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas SKPD di Bagian Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta Perencanaan dan Keuangan;



- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bagian Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta Perencanaan dan Keuangan;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di Bagian Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta Perencanaan dan Keuangan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan yang berkaitan dengan tugasnya.

## **1. BAGIAN ORGANISASI**

### **Tugas Pokok**

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi.

### **Fungsi**

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Organisasi;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Organisasi sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bagian Organisasi;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Organisasi; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**m. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**

**Tugas Pokok**

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan.

**Fungsi**

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang protocol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**n. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

**Tugas Pokok**

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas perencanaan, keuangan dan pelaporan.

**Fungsi**

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;



- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**o. BAGIAN UMUM**

**Tugas Pokok**

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

**Fungsi**

- a. Perencanaan dan penyusunan program operasional kerja di Bagian Umum;
- b. Pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan, pengendalian dan mengatur penyelenggaraan tugas di Bagian Umum sesuai lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pengendalian kegiatan di Bagian Umum;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bagian Umum; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**p. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Tugas Pokok**

Melaksanakan kegiatan teknis berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu yang dikoordinir oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah.



## 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang ada. Dengan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang tepat, maka sumber daya manusia tersebut dapat melaksanakan tugas, pokok dan fungsi serta bertanggung jawab sehingga menghasilkan keluaran yang berkualitas dan sangat memuaskan juga.

Berikut disampaikan data terkait sumber daya aparatur di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

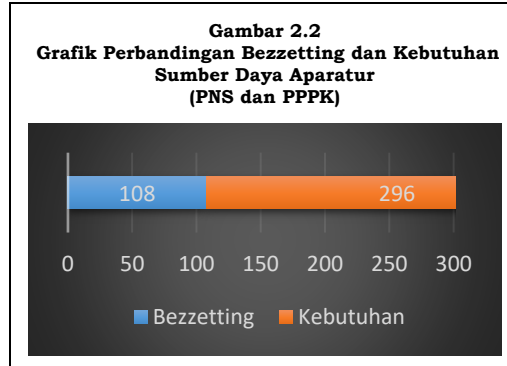
**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Bezetting dan Kebutuhan**  
**Sumber Daya Aparatur**  
**(PNS dan PPPK)**

No	Perangkat	B	K
1	Sekretaris Daerah	1	1
2	Asisten I, II, dan III	3	3
3	Staf Ahli Bupati	3	3
4	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	1	1
	- Jabatan Fungsional Tertentu	3	6
	- Jabatan Pelaksana	3	15
5	Kepala Bagian Hukum	1	1
	- Jabatan Fungsional Tertentu	4	14
	- Jabatan Pelaksana	6	21
6	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	1
	- Jabatan Fungsional Tertentu	2	10
	- Jabatan Pelaksana	3	21
7	Kepala Bagian Kerjasama dan Pertanahan	1	1
	- Kepala Sub Bagian Tata Guna Tanah	1	1
	- Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik	1	1
	- Jabatan Fungsional Tertentu	1	9
8	- Jabatan Pelaksana	3	16
	Kepala Bagian Pembangunan dan Perekonomian	1	1
	- Jabatan Fungsional Tertentu	3	6
9	- Jabatan Pelaksana	2	12
	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1	1
	- Jabatan Fungsional Tertentu	13	14
10	- Jabatan Pelaksana	4	10
	Kepala Bagian Sumber Daya Alam	1	1
	- Jabatan Fungsional Tertentu	5	6
11	- Jabatan Pelaksana	1	8
	Kepala Bagian Umum	1	1
	- Jabatan Fungsional Tertentu	4	12
12	- Jabatan Pelaksana	4	28
	Kepala Bagian Organisasi	1	1
	- Jabatan Fungsional Tertentu	4	4
13	- Jabatan Pelaksana	5	9
	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	1
	- Kepala Sub Bagian Protokol	1	1
	- Jabatan Fungsional Tertentu	1	5



No	Perangkat	B	K
	- Jabatan Pelaksana	8	36
14	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	0	1
	- Jabatan Fungsional Tertentu	3	5
	- Jabatan Pelaksana	6	8
<b>Jumlah</b>		<b>108</b>	<b>296</b>

Sumber : Peta Jabatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya



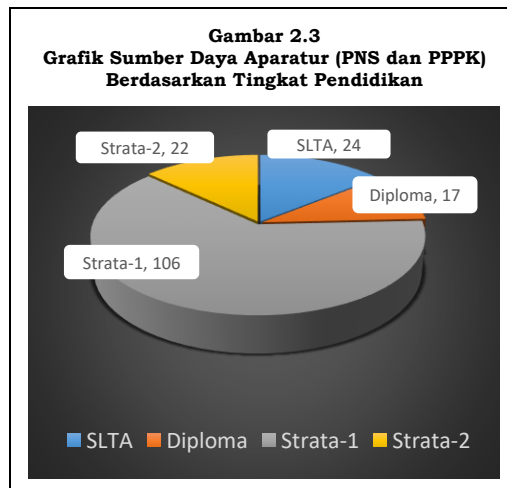
Secara umum dari penjabaran tabel 2.1 dan gambar 2.2 diatas, dapat diketahui bahwa komposisi sumber daya aparatur

masih jauh dari kata ideal. Mengingat dalam kebutuhan sumber daya aparatur tersebut, hanya 36,49% yang terisi dari total kebutuhan.

**Tabel 2.2**  
**Sumber Daya Aparatur (PNS dan PPPK)**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Perangkat	Pendidikan				Jumlah
		SLTA	Diploma	S-1	S-2	
1	Sekretaris Daerah	-	-	-	1	<b>1</b>
2	Staf Ahli	-	-	1	2	<b>3</b>
3	Asisten	-	-	1	2	<b>3</b>
4	Bagian Tata Pemerintahan	1	1	10	2	<b>14</b>
5	Bagian Hukum	2	1	13	1	<b>17</b>
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2	1	6	1	<b>10</b>
7	Bagian Kerjasama dan Pertanahan	3	1	8	1	<b>13</b>
8	Bagian Pembangunan dan Perekonomian	4	-	7	1	<b>12</b>
9	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	3	20	1	<b>24</b>
10	Bagian Sumber Daya Alam	-	1	6	2	<b>9</b>
11	Bagian Umum	8	4	10	1	<b>23</b>
12	Bagian Organisasi	1	-	6	5	<b>12</b>
13	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2	-	13	1	<b>16</b>
14	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	5	5	1	<b>12</b>
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>17</b>	<b>106</b>	<b>22</b>	<b>169</b>

Kondisi terakhir per September 2025



Berdasarkan tabel 2.2 dan gambar 2.3, diketahui bahwa sebagian besar tingkat pendidikan Sumber Daya Aparatur di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu

Raya di tahun 2025 memiliki jenjang pendidikan setelah SLTA yang sangat baik dengan jumlah 145

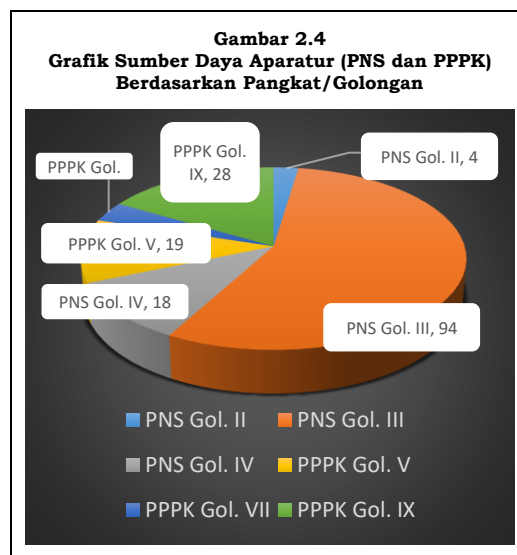


(seratus empat puluh lima) orang atau 85,80% dari jumlah total pegawai.

**Tabel 2.3**  
**Sumber Daya Aparatur (PNS dan PPPK)**  
**Berdasarkan Pangkat/Golongan**

No	Perangkat	Pangkat / Golongan						Jumlah	
		PNS				PPPK			
		I	II	III	IV	V	VII		IX
1	Sekretaris Daerah	-	-	-	1	-	-	-	<b>1</b>
2	Staf Ahli	-	-	-	3	-	-	-	<b>3</b>
3	Asisten	-	-	-	3	-	-	-	<b>3</b>
4	Bagian Tata Pemerintahan	-	1	8	1	1	1	2	<b>14</b>
5	Bagian Hukum	-	-	14	1	2	-	-	<b>17</b>
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	1	2	2	1	1	3	<b>10</b>
7	Bagian Kerjasama dan Pertanahan	-	-	6	1	3	1	2	<b>13</b>
8	Bagian Pembangunan dan Perekonomian	-	-	5	1	3	-	3	<b>12</b>
9	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	19	1	-	-	4	<b>24</b>
10	Bagian Sumber Daya Alam	-	-	4	2	-	-	3	<b>9</b>
11	Bagian Umum	-	2	9	-	6	2	4	<b>23</b>
12	Bagian Organisasi	-	-	8	1	-	-	3	<b>12</b>
13	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	10	1	2	-	3	<b>16</b>
14	Bagian Perencanaan dan Keuangan	-	-	9	-	1	1	1	<b>12</b>
<b>Jumlah</b>		-	<b>4</b>	<b>94</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>169</b>

Kondisi terakhir per September 2025



Berdasarkan tabel 2.3 dan gambar 2.4 diketahui pula bahwa secara pangkat / golongan sumber daya aparatur untuk PNS sudah sangat baik dengan yang telah memiliki pangkat /

golongan diatas pengatur mencapai 96,55% dari jumlah sumber daya aparatur PNS sebanyak 116 orang. Sebagaimana diketahui, atas kebijakan pemerintah terkait penyederhanaan birokrasi menjadi hambatan bagi sumber daya aparatur dalam mengisi suatu jabatan tertentu. Hal ini akibat mengecilnya posisi struktural khususnya untuk eselon IV yang sebelumnya memiliki 33 (tiga puluh tiga) jabatan struktural menjadi 3 (tiga) jabatan struktural.

Akan sangat disayangkan jika sumber daya aparatur yang berkualitas dengan pangkat/golongan yang



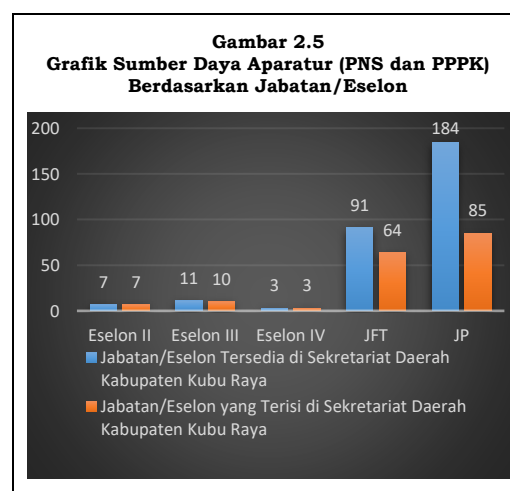
sudah cukup tidak dapat mengembangkan dan menunjukkan kompetensi mereka.

Adapun langkah agar sumber daya aparatur dapat menunjukkan kompetensi mereka dengan mengikuti uji kompetensi peralihan dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional tertentu. Uji kompetensi ini menjadi patokan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sumber daya aparatur dalam menempati suatu jabatan, serta bertujuan untuk memastikan sumber daya aparatur memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan tugasnya secara efektif, efisien dan produktif serta memberikan jalur yang jelas bagi sumber daya aparatur untuk menunjukkan kesiapan mereka terhadap tanggung jawabnya nanti.

**Tabel 2.4**  
**Sumber Daya Aparatur (PNS dan PPPK)**  
**Berdasarkan Jabatan/Eselon**

No	Perangkat	Jabatan/Eselon					Jumlah
		JP	JFT	IV	III	II	
1	Sekretaris Daerah	-	-	-	-	1	1
2	Staf Ahli Bupati	-	-	-	-	3	3
3	Asisten	-	-	-	-	3	3
4	Bagian Tata Pemerintahan	8	5	-	1	-	14
5	Bagian Hukum	8	8	-	1	-	17
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5	4	-	1	-	10
7	Bagian Kerjasama dan Pertanahan	8	2	2	1	-	13
8	Bagian Pembangunan dan Perekonomian	4	7	-	1	-	12
9	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	2	21	-	1	-	24
10	Bagian Sumber Daya Alam	5	3	-	1	-	9
11	Bagian Umum	20	2	-	1	-	23
12	Bagian Organisasi	6	5	-	1	-	12
13	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	11	3	1	1	-	16
14	Bagian Perencanaan dan Keuangan	8	4	-	-	-	12
<b>Jumlah</b>		<b>85</b>	<b>64</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>169</b>

Kondisi terakhir per September 2025



Berdasarkan Tabel 2.4 dan Gambar 2.5 dapat dijelaskan bahwa jumlah jabatan eselon di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya berjumlah 21 (dua puluh satu)

jabatan. Yang terdiri dari 7 (tujuh) jabatan untuk eselon II yaitu 1 (satu) jabatan Sekretaris Daerah, 3 (tiga) jabatan Asisten, 3 (tiga) jabatan Staf Ahli. 11

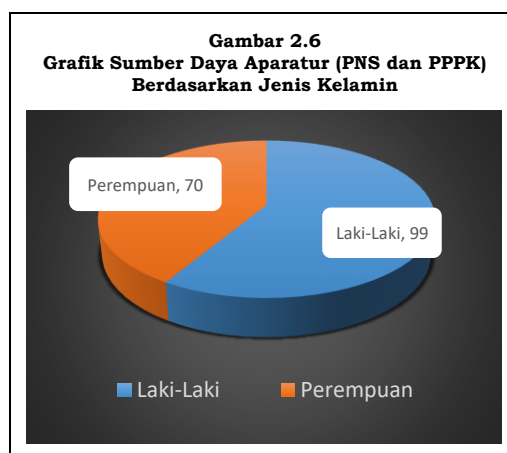


(sebelas) jabatan untuk eselon III yaitu 11 (sebelas) jabatan Kepala Bagian, dan 3 (tiga) jabatan untuk eselon IV yaitu 3 (tiga) jabatan Kepala Sub Bagian. Adapun dari tabel diatas diketahui bahwa terdapat kekosongan pada jabatan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan. Kekosongan tersebut dikarenakan pelaksana jabatan tersebut telah memasuki masa purna tugas. Kekurangan juga banyak terdapat pada jabatan fungsional tertentu dan umum berdasarkan kebutuhan dari peta jabatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

**Tabel 2.5**  
**Sumber Daya Aparatur (PNS dan PPK)**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Perangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Sekretaris Daerah	1	-	1
2	Asisten I, II, dan III	2	1	3
3	Staf Ahli Bupati	2	1	3
4	Bagian Tata Pemerintahan	10	4	14
5	Bagian Hukum	7	10	17
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	7	3	10
7	Bagian Kerjasama dan Pertanahan	9	4	13
8	Bagian Pembangunan dan Perekonomian	8	4	12
9	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	15	9	24
10	Bagian Sumber Daya Alam	4	5	9
11	Bagian Umum	11	12	23
12	Bagian Organisasi	5	7	12
13	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12	4	16
14	Bagian Perencanaan dan Keuangan	6	6	12
<b>Jumlah</b>		<b>99</b>	<b>70</b>	<b>169</b>

Kondisi terakhir per September 2025



Berdasarkan Tabel 2.5 dan Gambar 2.6 dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya telah ikut menerapkan kesetaraan gender sehingga perbedaan jumlah jenis kelamin laki-laki dan perempuan tidak terlalu jauh berbeda. Dengan jumlah laki-laki sebanyak 99 orang atau 58,58% dan perempuan sebanyak 70 orang atau 41,42% dari jumlah keseluruhan sumber daya aparatur di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.



### 2.1.2.2. Sarana dan Prasarana

Secara umum kondisi sarana dan prasarana di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya sudah cukup baik. Namun masih dibutuhkan penambahan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan secara bertahap mengingat kemampuan anggaran yang terbatas, dimana penambahan-penambahan tersebut disesuaikan dengan standar kualitas yang dibutuhkan. Disamping itu pemeliharaan secara rutin dan berkala juga dilakukan agar sarana dan prasarana tetap dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya dalam upaya menunjang pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai target kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien.

**Tabel 2.6**  
**Rekapitulasi Barang Ke Neraca**

Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)
<b>1.3.</b>	<b>Aset Tetap</b>	<b>3.136</b>	<b>121.927.656.201,58</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>Tanah</b>	<b>46</b>	<b>42.851.254.723,68</b>
1.3.1.01.	Tanah	46	42.851.254.723,68
<b>1.3.2.</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>3.066</b>	<b>25.633.455.823,50</b>
1.3.2.01.	Alat Besar	37	3.071.435.119,00
1.3.2.02.	Alat Angkutan	73	8.586.337.267,50
1.3.2.03.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	6	24.475.000,00
1.3.2.04.	Alat Pertanian	1	4.585.000,00
1.3.2.05.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.251	7.599.473.670,00
1.3.2.06.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	155	2.063.446.731,00
1.3.2.07.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1	9.000.000,00
1.3.2.08.	Alat Laboratorium	92	385.333.700,00
1.3.2.09.	Alat Persenjataan	4	62.655.150,00
1.3.2.10.	Komputer	436	3.734.644.186,00
1.3.2.15.	Alat Keselamatan Kerja	10	92.070.000,00
<b>1.3.3.</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>16</b>	<b>51.466.337.987,40</b>
1.3.3.01.	Bangunan Gedung	15	51.466.337.987,40
1.3.3.02.	Monumen	1	0,00
<b>1.3.4.</b>	<b>Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>7</b>	<b>1.966.657.667,00</b>
1.3.4.02.	Bangunan Air	1	985.022.037,00
1.3.4.03.	Instalasi	2	98.000.337,00
1.3.4.04.	Jaringan	4	883.635.293,00
<b>1.3.5.</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>1</b>	<b>9.950.000,00</b>
1.3.5.01.	Bahan Perpustakaan	1	9.950.000,00
<b>1.5.</b>	<b>Aset Lainnya</b>	<b>222</b>	<b>3.994.935.571,00</b>
<b>1.5.3.</b>	<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>2</b>	<b>60.430.000,00</b>
1.5.3.01.	Aset Tidak Berwujud	2	60.430.000,00
<b>1.5.4.</b>	<b>Aset Lain-Lain</b>	<b>220</b>	<b>3.934.505.571,00</b>
1.5.4.01.	Aset Lain-Lain	220	3.934.505.571,00

Sumber: Laporan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025

### 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 55 Tahun 2021 tanggal 19 Oktober 2021 Tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah



Kabupaten Kubu Raya dipahami bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis serta menyelenggarakan tugas pemerintah daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan lingkup tugas, yang dapat dibagi kedalam 3 (tiga) peran utama yaitu:

1. Pelayanan Sebagai Pengambil Kebijakan

Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan yang ditangani Sekretariat Daerah merupakan unit kerja penentu dalam menyusun dan merumuskan kebijakan pembangunan daerah, administrasi pemerintahan, kemasyarakatan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana/prasarana pemerintah daerah yang diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah.

2. Pelayanan Sebagai Koordinator Pembangunan Daerah

Pelayanan sebagai koordinator perumusan kebijakan pembangunan daerah, Sekretariat Daerah telah melaksanakan berbagai peran koordinatif yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.

3. Pelayanan Administrasi

Sekretariat Daerah melakukan kajian, telaahan, evaluasi kebijakan, serta penyediaan data dan informasi sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan daerah dan pelayanan administratif kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

**Tabel 2.7**  
**Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya**  
**Periode 2019-2024**

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Produk Hukum yang diselesaikan: - Peraturan Daerah (Dokumen) - Peraturan Bupati (Dokumen) - Surat Keputusan Bupati (Dokumen)	16 117 918	8 113 1.026	12 115 975	12 91 855	19 81 798	8 51 1.004
2.	Penyelesaian Permasalahan Hukum yang difasilitasi (Kasus)	1	2	1	1	6	4
3.	Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan secara e-Procurement (Paket)	28	86	92	72	791	2.893



No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.	Jamaah Haji yang Difasilitasi dan Diberangkatkan (Orang)	318	0 (Covid-19)	0 (Covid-19)	139	320	325
5.	Fasilitasi Kontingen MTQ (Orang)	0	52	72	59	90	65
6.	Rumah Ibadah yang diberikan Bantuan (Rumah Ibadah)	n/a	n/a	n/a	n/a	89	28
7.	Pemberian Insentif terhadap: - Fardhu Kifayah (Orang) - Guru Ngaji (Orang)	485 1.060	485 1.060	485 1.060	485 1.060	490 1.066	490 1.066
8.	Pemberian Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan terhadap non ASN diluar Pemerintahan Orang)	n/a	n/a	n/a	n/a	7.544	26.120
9.	Konflik Masalah Pertanahan yang Diselesaikan (Kasus)	12	12	12	12	16	6
10.	Kerjasama Pemerintah Daerah yang direalisasikan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (Dokumen Perjanjian Kerjasama)	32	26	26	77	20	12
11.	Pengadaan OPD melalui Lelang yang diselesaikan (Paket)	111	72	228	172	114	34
12.	Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kegiatan)	1164	1104	1044	1212	1080	516

Dari tabel 2.7 diatas, secara keseluruhan pelayanan yang dilaksanakan terhadap publik dan masyarakat baik dari unsur pemerintahan daerah dan unsur masyarakat sudah terlaksana dengan baik. Terkait capaian “n/a” itu dikarenakan pada tahun tersebut kegiatan belum/tidak dilaksanakan, dan salah satunya akibat dari pandemi *Covid-19* sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut batal untuk dilaksanakan.



**Tabel 2.8**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya**  
**Periode Rencana Strategis Tahun 2019-2024**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Reformasi Birokrasi				B	-	-	-	-	CC (51,56)	-	-	-	-	0	-	-	-	-
2	Nilai AKIP				B	B	BB (71,20)	BB (71,30)	BB (71,40)	A (80,01)	BB (71,50)	BB (75,30)	BB (76,70)	BB (76,95)	100	100	100	100	100
3	Indeks Kepuasan Masyarakat				B	B	B (85,80)	B (86,00)	B (86,20)	B (84,14)	B (85,80)	B (86,80)	B (86,41)	B (87,12)	100	100	100	100	99,50

Dari tabel 2.8 diatas, secara rata-rata realisasi capaian kinerja perangkat daerah telah tercapai berdasarkan target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa catatan dari tabel diatas antara lain:

1. Tidak ditetapkannya Indeks Reformasi Birokrasi sebagai Indikator Kinerja Utama perangkat daerah dikarenakan perubahan sasaran strategis pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang diatur didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perubahan (RPJMD-P) yang diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021.
2. Perubahan target pada indikator Nilai AKIP di tahun 2022 akibat dari perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021.



3. Pada tahun 2020 terdapat penurunan untuk nilai AKIP dari tahun 2019, yaitu dari 82,00 ke 80,01 atau sebesar 1,99 poin. Penurunan ini memang dikarenakan masih kurangnya kelengkapan/bukti dukung dari pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah. Adapun penurunan tersebut diakibatkan pula masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan serta masih kurangnya sumber daya aparatur dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil yang kompeten dan sudah berpengalaman dibidang yang ditanganinya.
4. Terkait indikator Indeks Reformasi Birokrasi, pada tahun 2019 dan 2020 di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya menggunakan indikator milik Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
5. Untuk realisasi capaian kinerja tahun 2023 dan 2024 pada penilaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang dimiliki, serta kurang efektif dan efisiennya penerapan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang sudah dimiliki.



**Tabel 2.9**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya**  
**Periode Rencana Strategis Tahun 2019-2024**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
<b>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</b>																		
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>5.080.357.575</b>	-	-	-	-	<b>4.796.054.685</b>	-	-	-	-	<b>94,40</b>	-	-	-	-	<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.131.400.000	-	-	-	-	962.774.931	-	-	-	-	85,10	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	59.500.000	-	-	-	-	39.339.800	-	-	-	-	66,12	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	9.000.000	-	-	-	-	9.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	474.255.000	-	-	-	-	468.775.000	-	-	-	-	98,84	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	65.721.900	-	-	-	-	65.351.350	-	-	-	-	99,44	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.100.000	-	-	-	-	52.043.300	-	-	-	-	99,89	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	-	-	-	-	49.984.200	-	-	-	-	99,97	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.300.000	-	-	-	-	56.935.000	-	-	-	-	76,63	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	79.920.000	-	-	-	-	79.920.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	1.914.500.000	-	-	-	-	1.843.113.800	-	-	-	-	96,27	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	691.690.000	-	-	-	-	691.687.804	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	327.970.675	-	-	-	-	327.825.000	-	-	-	-	99,96	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Ketatausahaan Asisten Pemrintahan	150.000.000	-	-	-	-	149.304.500	-	-	-	-	99,54	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>4.224.766.250</b>	-	-	-	-	<b>4.054.301.765</b>	-	-	-	-	<b>95,97</b>	-	-	-	-	<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	440.000.000	-	-	-	-	433.000.000	-	-	-	-	98,41	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	398.500.000	-	-	-	-	361.778.900	-	-	-	-	90,79	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	903.342.000	-	-	-	-	879.942.200	-	-	-	-	97,41	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Pengadaan Meubeler	289.776.250	-	-	-	-	288.391.000	-	-	-	-	99,52	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Penyediaan Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	20.400.000	-	-	-	-	20.400.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	536.000.000	-	-	-	-	529.265.355	-	-	-	-	98,74	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.351.400.000	-	-	-	-	1.266.995.950	-	-	-	-	93,75	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	253.600.000	-	-	-	-	242.785.360	-	-	-	-	95,74	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	31.748.000	-	-	-	-	31.743.000	-	-	-	-	99,98	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Radio SSB dan 2 Meter Band	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>255.295.700</b>	-	-	-	-	<b>254.724.300</b>	-	-	-	-	<b>99,78</b>	-	-	-	-	<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>	
	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	168.025.000	-	-	-	-	167.760.600	-	-	-	-	99,84	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%	
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Bupati	60.850.000	-	-	-	-	60.625.000	-	-	-	-	99,63	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%	
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
	Kegiatan Workshop Implementasi Proses Pengadaan Barang/Jasa	1.118.400	-	-	-	-	1.118.400	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%	
	Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan	25.302.300	-	-	-	-	25.220.300	-	-	-	-	99,68	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%	
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>192.390.750</b>	-	-	-	-	<b>186.334.600</b>	-	-	-	-	<b>96,85</b>	-	-	-	-	<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>	
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.783.850	-	-	-	-	4.783.400	-	-	-	-	99,99	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%	
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	6.181.700	-	-	-	-	6.181.400	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%	
	Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	9.957.100	-	-	-	-	8.516.700	-	-	-	-	85,53	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%	
	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	39.352.550	-	-	-	-	37.642.550	-	-	-	-	95,65	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%	
	Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah SKPD	7.055.650	-	-	-	-	7.055.650	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%	
	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Kabupaten	25.059.900	-	-	-	-	122.154.900	-	-	-	-	97,68	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%	
	<b>Program Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan</b>	<b>53.225.950</b>	-	-	-	-	<b>52.686.150</b>	-	-	-	-	<b>98,99</b>	-	-	-	-	<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>	
	Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Pengembangan Energi Sumber Daya Mineral	53.225.950	-	-	-	-	52.686.150	-	-	-	-	98,99	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%	
	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>3.890.000</b>	-	-	-	-	<b>3.890.000</b>	-	-	-	-	<b>100,00</b>	-	-	-	-	<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>	
	Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pameran / Expo	3.890.000	-	-	-	-	3.890.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%	
	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	-	-	-	-	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
	<b>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	<b>879.759.400</b>	-	-	-	-	<b>709.738.690</b>	-	-	-	-	<b>80,67</b>	-	-	-	-	<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>	
	Kegiatan Sertifikasi Tanah Masyarakat (PRODA)	98.880.600	-	-	-	-	33.615.600	-	-	-	-	34,00	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%	
	Kegiatan Sertifikasi Tanah Pemerintah	720.937.200	-	-	-	-	625.731.590	-	-	-	-	86,79	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%	
	Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Pemerintah dan Kepentingan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
	Kegiatan Sosialisasi Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	2.475.800	-	-	-	-	22.252.300	-	-	-	-	99,01	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%	



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah	7.465.800	-	-	-	-	28.139.200	-	-	-	-	75,11	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah</b>	<b>1.679.973.325</b>	-	-	-	-	<b>1.676.014.300</b>	-	-	-	-	<b>99,76</b>	-	-	-	-	<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
	Kegiatan Dialog Audiensi Dengan Tokoh tokoh Masyarakat, Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	22.425.000	-	-	-	-	220.650.000	-	-	-	-	99,20	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintahan Non Departemen / Luar Negeri	53.760.000	-	-	-	-	253.635.000	-	-	-	-	99,95	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
	Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	10.180.000	-	-	-	-	608.967.900	-	-	-	-	99,80	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	13.608.325	-	-	-	-	313.455.000	-	-	-	-	99,95	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Pelayanan dan Peningkatan Kapasitas Kehumasan dan Keprotokolian	80.000.000	-	-	-	-	279.306.400	-	-	-	-	99,75	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>37.676.500</b>	-	-	-	-	<b>35.426.000</b>	-	-	-	-	<b>94,03</b>	-	-	-	-	<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
	Kegiatan Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	9.997.950	-	-	-	-	9.997.950	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	27.678.550	-	-	-	-	25.428.050	-	-	-	-	91,87	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Serapan Anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
	<b>Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan</b>	<b>575.288.400</b>	-	-	-	-	<b>520.134.000</b>	-	-	-	-	<b>90,41</b>	-	-	-	-	<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	205.937.000	-	-	-	-	201.745.000	-	-	-	-	97,96	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Izin Lokasi	115.576.400	-	-	-	-	111.651.400	-	-	-	-	96,60	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Lokakarya Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	112.232.000	-	-	-	-	74.052.000	-	-	-	-	65,98	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Tanah Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial Serta Tanah Milik Pemerintah Daerah	141.543.000	-	-	-	-	132.685.600	-	-	-	-	93,74	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi</b>	<b>1.838.687.300</b>	-	-	-	-	<b>1.784.480.041</b>	-	-	-	-	<b>97,05</b>	-	-	-	-	<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
	Kegiatan Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya	407.772.900	-	-	-	-	388.386.450	-	-	-	-	95,25	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Publikasi Pemberitaan Melalui Media Cetak dan Elektronik	1.198.227.000	-	-	-	-	1.184.171.191	-	-	-	-	98,83	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Penyebarluasan Informasi	133.450.900	-	-	-	-	117.245.900	-	-	-	-	87,86	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Penerbitan Buletin	99.236.500	-	-	-	-	94.676.500	-	-	-	-	95,40	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Kehumasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
	<b>Program Implementasi LPSE</b>	<b>905.364.600</b>	-	-	-	-	<b>898.424.200</b>	-	-	-	-	<b>99,23</b>	-	-	-	-	<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Kegiatan Operasional dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung LPSE	142.944.400	-	-	-	-	136.784.000	-	-	-	-	95,69	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Layanan Proses Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Melalui LPSE	591.967.600	-	-	-	-	591.710.300	-	-	-	-	99,96	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	7.926.750	-	-	-	-	27.882.550	-	-	-	-	99,84	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Temu Nasional / Rakornas Ahli Pengadaan Barang / Jasa	705.500	-	-	-	-	705.500	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa	2.367.450	-	-	-	-	72.156.750	-	-	-	-	99,71	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi LPSE Kabupaten Kubu Raya	3.259.500	-	-	-	-	22.991.700	-	-	-	-	98,85	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ dan Standarisasi LPSE	6.193.400	-	-	-	-	46.193.400	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>236.664.450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>225.478.350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
	Kegiatan Sistem Informasi Perencanaan SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD	7.220.300	-	-	-	-	7.220.300	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten	105.322.000	-	-	-	-	99.126.250	-	-	-	-	94,12	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten	90.296.200	-	-	-	-	85.305.850	-	-	-	-	94,47	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Fasilitasi e-LAKIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pembangunan Daerah	33.825.950	-	-	-	-	33.825.950	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial</b>	<b>5.032.770.550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.976.424.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98,88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
	Kegiatan Fasilitasi Petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji	5.032.770.550	-	-	-	-	4.976.424.500	-	-	-	-	98,88	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	<b>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>	<b>161.626.900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>156.835.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
	Kegiatan Penyuluhan Hukum	24.800.000	-	-	-	-	24.800.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan RANHAM	22.319.400	-	-	-	-	22.319.400	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Penyelesaian Perkara Perdata dan TUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Hukum	114.507.500	-	-	-	-	109.715.600	-	-	-	-	95,82	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	<b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>	<b>1.550.045.900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.547.119.750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
	Kegiatan Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama Antar Daerah pada Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia	4.364.800	-	-	-	-	54.353.600	-	-	-	-	99,98	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah / Instansi / Lembaga	25.520.000	-	-	-	-	224.656.400	-	-	-	-	99,62	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Fasilitasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli)	47.090.400	-	-	-	-	47.090.050	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	153.353.000	-	-	-	-	1.151.827.000	-	-	-	-	99,87	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Evaluasi Kerjasama Antar Daerah / Instansi / Lembaga	69.717.700	-	-	-	-	69.192.700	-	-	-	-	99,25	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>912.520.100</b>	-	-	-	-	<b>897.512.400</b>	-	-	-	-	<b>98,36</b>	-	-	-	-	<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
	Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	239.091.800	-	-	-	-	233.087.600	-	-	-	-	97,49	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Pengelolaan dan Penataan Dokumentasi Hukum	9.932.000	-	-	-	-	9.932.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Pengkajian Produk-Produk Hukum	68.717.500	-	-	-	-	363.714.000	-	-	-	-	98,64	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Penyebarluasan Produk Hukum	34.428.000	-	-	-	-	34.428.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Keluarga Sadar Hukum	31.943.000	-	-	-	-	31.943.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Klarifikasi Peraturan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Kegiatan Sistem Informasi Hukum	27.629.000	-	-	-	-	27.629.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Klarifikasi Peraturan Desa	81.814.400	-	-	-	-	177.814.400	-	-	-	-	97,80	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah	18.964.400	-	-	-	-	18.964.400	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>	<b>246.311.000</b>	-	-	-	-	<b>230.566.450</b>	-	-	-	-	<b>93,61</b>	-	-	-	-	<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
	Kegiatan Pembakuan Nama Rupa-Rupa Bumi	51.958.000	-	-	-	-	42.658.000	-	-	-	-	82,10	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Koordinasi Penegasan Batas Daerah	46.353.350	-	-	-	-	46.118.400	-	-	-	-	99,49	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Fasilitasi Penegasan Batas Wilayah Kecamatan	59.799.650	-	-	-	-	59.607.650	-	-	-	-	99,68	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Daerah dan Nasional	30.800.000	-	-	-	-	24.965.000	-	-	-	-	81,06	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kecamatan	45.000.000	-	-	-	-	44.817.400	-	-	-	-	99,59	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Kubu Raya	12.400.000	-	-	-	-	12.400.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	<b>Program Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kehutanan</b>	<b>31.475.950</b>	-	-	-	-	<b>31.445.200</b>	-	-	-	-	<b>99,90</b>	-	-	-	-	<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
	Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatannya	31.475.950	-	-	-	-	31.445.200	-	-	-	-	99,90	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	<b>Program Penataan Kecamatan / Kelurahan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Kegiatan Pemekaran Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Kegiatan Pembentukan Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah</b>	<b>3.550.635.250</b>	-	-	-	-	<b>3.477.964.950</b>	-	-	-	-	<b>97,95</b>	-	-	-	-	<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
	Kegiatan Penyusunan Formasi Jabatan PNS	46.956.050	-	-	-	-	46.361.250	-	-	-	-	98,73	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi	143.650.000	-	-	-	-	143.462.000	-	-	-	-	99,87	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Penyusunan Penetapan Kinerja	3.430.500	-	-	-	-	3.430.500	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Penataan, Monitoring dan Evaluasi SOPD Kabupaten Kubu Raya	54.988.000	-	-	-	-	54.668.000	-	-	-	-	99,42	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Kegiatan Rakortek Bidang Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Tingkat Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Kegiatan Penyusunan Data Base e-Formasi	49.151.500	-	-	-	-	46.727.500	-	-	-	-	95,07	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	17.963.700	-	-	-	-	17.963.700	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Analisis Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2.700.000	-	-	-	-	52.315.000	-	-	-	-	99,27	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Tangga Jabatan dan Pendukung Perkantoran	2.884.000.000	-	-	-	-	2.819.800.000	-	-	-	-	97,77	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Asistensi dan Penyusunan Evaluasi Jabatan	40.957.500	-	-	-	-	40.376.000	-	-	-	-	98,58	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	23.997.500	-	-	-	-	23.997.500	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Kegiatan Sosialisasi Tata Naskah Dinas	4.889.150	-	-	-	-	4.889.150	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	94.503.850	-	-	-	-	94.119.350	-	-	-	-	99,59	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Fasilitasi Inovasi Pelayanan Publik	5.129.500	-	-	-	-	5.129.500	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi	77.334.000	-	-	-	-	74.334.000	-	-	-	-	96,12	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur	50.984.000	-	-	-	-	50.391.500	-	-	-	-	98,84	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	<b>Program Pembinaan Mental Spiritual Umat Beragama</b>	<b>753.145.650</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>675.947.350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>89,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
	Kegiatan Fasilitasi Ibadah Haji	198.092.700	-	-	-	-	126.277.500	-	-	-	-	63,75	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Safari Keagamaan	149.374.650	-	-	-	-	146.540.000	-	-	-	-	98,10	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Umum Lainnya	260.840.700	-	-	-	-	260.068.050	-	-	-	-	99,70	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Fasilitasi Pengiriman Kontingen MTQ Tingkat Provinsi Kalimantan Barat	144.837.600	-	-	-	-	143.061.800	-	-	-	-	98,77	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	<b>Program Perumusan Kebijakan Bidang Pembangunan Daerah</b>	<b>47.582.850</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47.320.300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
	Kegiatan Fasilitasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Kegiatan Fasilitasi, Monitoring dan Koordinasi SIRUP	13.707.900	-	-	-	-	13.707.900	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Fasilitasi Koordinas, Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPRA)	33.874.950	-	-	-	-	33.612.400	-	-	-	-	99,22	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	<b>Program Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah</b>	<b>113.118.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112.179.600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
	Kegiatan Monitoring dan Koordinasi Pengelolaan Usaha Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Kegiatan Fasilitasi Tim Pengembangan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Kegiatan Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Kegiatan Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan Akses Keuangan Daerah	6.325.000	-	-	-	-	16.325.000	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Pengendalian Inflasi Daerah	0.033.700	-	-	-	-	29.717.400	-	-	-	-	-	98,95	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Kebijakan Perencanaan Daerah	0.033.700	-	-	-	-	29.883.700	-	-	-	-	-	99,50	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Potensi Unggulan Daerah	6.726.000	-	-	-	-	36.253.500	-	-	-	-	-	98,71	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	<b>Program Peningkatan Kinerja Badan Usaha Daerah</b>	<b>136.644.950</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>136.182.950</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>
	Kegiatan Fit and Proper Test Direktur PDAM Kabupaten Kubu Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	Kegiatan Seleksi Dewan Pengawasan PERUMDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya	109.594.000	-	-	-	-	109.134.500	-	-	-	-	-	99,58	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah	27.050.950	-	-	-	-	27.048.450	-	-	-	-	-	99,99	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
<b>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta Pemutakhirannya</b>																			
	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.870.284.311</b>	<b>5.221.221.519</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.772.145.799</b>	<b>5.090.974.475</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99,01</b>	<b>97,51</b>	<b>-14,72%</b>	<b>0,00%</b>	
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-	-	9.870.284.311	5.221.221.519	-	-	-	9.772.145.799	5.090.974.475	-	-	-	99,01	97,51	-14,72%	0,00%	
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	-	-	-	9.870.284.311	5.221.221.519	-	-	-	9.772.145.799	5.090.974.475	-	-	-	99,01	97,51	-14,72%	0,00%	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>	<b>-</b>	<b>177.285.703</b>	<b>135.642.600</b>	<b>106.200.037</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>104.360.403</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-100,00%</b>	
	Kegiatan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	177.285.703	135.642.600	106.200.037	-	-	173.551.200	132.941.476	104.360.403	-	-	97,89	98,01	98,27	-	-	-100,00%	-100,00%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	-	177.285.703	135.642.600	106.200.037	-	-	173.551.200	132.941.476	104.360.403	-	-	97,89	98,01	98,27	-	-	-	-
	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>-</b>	<b>318.558.393</b>	<b>399.622.120</b>	<b>498.024.819</b>	<b>286.193.318</b>	<b>-</b>	<b>313.702.300</b>	<b>394.576.160</b>	<b>479.332.340</b>	<b>183.833.210</b>	<b>-</b>	<b>98,48</b>	<b>98,74</b>	<b>96,25</b>	<b>64,23</b>	<b>-2,64%</b>	<b>-12,51%</b>	
	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	318.558.393	399.622.120	498.024.819	286.193.318	-	313.702.300	394.576.160	479.332.340	183.833.210	-	98,48	98,74	96,25	64,23	-2,64%	-12,51%	
	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	148.036.646	36.372.414	-	-	-	142.817.200	15.109.600	-	-	-	96,47	41,54	-29,60%	0,00%	
	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	318.558.393	399.622.120	349.988.173	249.820.904	-	313.702.300	394.576.160	336.515.140	168.723.610	-	98,48	98,74	96,15	67,54	-5,90%	-14,36%	



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	-	3.602.408.738	560.681.740	330.445.354	600.764.622	-	3.060.584.875	428.986.100	230.404.140	340.595.900	-	84,96	76,51	69,73	56,69	-36,10%	-42,24%
	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	3.602.408.738	560.681.740	330.445.354	600.764.622	-	3.060.584.875	428.986.100	230.404.140	340.595.900	-	84,96	76,51	69,73	56,69	-36,10%	-42,24%
	Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	302.700.608	449.816.200	330.445.354	495.917.537	-	186.364.150	322.570.980	230.404.140	316.220.100	-	61,57	71,71	69,73	63,76	13,14%	14,13%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	3.299.708.130	110.865.540	-	104.847.085	-	2.874.220.725	106.415.120	-	24.375.800	-	87,11	95,99	0,00	0,00	-100,00%	#DIV/0!
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	-	211.710.048	222.478.210	162.664.259	217.453.881	-	209.373.500	217.282.130	154.451.937	166.688.100	-	98,90	97,66	94,95	76,65	0,67%	-5,54%
	Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	-	211.710.048	222.478.210	162.664.259	217.453.881	-	209.373.500	217.282.130	154.451.937	166.688.100	-	98,90	97,66	94,95	76,65	0,67%	-5,54%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	-	211.710.048	222.478.210	162.664.259	217.453.881	-	209.373.500	217.282.130	154.451.937	166.688.100	-	98,90	97,66	94,95	76,65	0,67%	-5,54%
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	-	-	-	57.945.699	29.738.842	-	-	-	57.940.860	20.225.500	-	-	-	99,99	68,01	-15,36%	0,00%
	Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah	-	-	-	57.945.699	29.738.842	-	-	-	57.940.860	20.225.500	-	-	-	99,99	68,01	-15,36%	0,00%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	-	-	-	57.945.699	29.738.842	-	-	-	57.940.860	20.225.500	-	-	-	99,99	68,01	-15,36%	0,00%
	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	-	327.488.562	465.976.660	481.733.953	417.017.914	-	326.618.260	454.328.322	413.741.934	322.277.530	-	99,73	97,50	85,89	77,28	6,23%	-0,33%
	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-	327.488.562	465.976.660	481.733.953	417.017.914	-	326.618.260	454.328.322	413.741.934	322.277.530	-	99,73	97,50	85,89	77,28	6,23%	-0,33%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	-	327.488.562	465.976.660	481.733.953	417.017.914	-	326.618.260	454.328.322	413.741.934	322.277.530	-	99,73	97,50	85,89	77,28	6,23%	-0,33%
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	-	29.309.026.110	32.924.179.566	40.472.438.782	39.952.076.035	-	27.593.651.741	31.779.049.635	35.389.209.492	37.056.215.010	-	94,15	96,52	87,44	92,75	8,05%	7,65%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	85.925.300	175.637.600	193.302.990	163.888.978	-	84.805.600	175.288.600	190.635.822	161.002.324	-	98,70	99,80	98,62	98,24	17,52%	17,38%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	57.038.000	43.086.600	57.136.556	40.955.192	-	55.937.700	42.964.600	56.175.900	40.401.900	-	98,07	99,72	98,32	98,65	-7,95%	-7,81%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	35.064.700	33.296.385	16.457.375	-	-	34.887.700	32.719.660	15.288.500	-	-	99,50	98,27	92,90	-17,23%	-18,64%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	47.065.200	46.006.094	30.391.994	-	-	47.033.200	45.837.960	29.832.600	-	-	99,93	99,63	98,16	-10,36%	-10,76%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	4.733.056	4.763.064	-	-	-	4.726.402	4.559.700	-	-	-	99,86	95,73	0,16%	0,00%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	6.690.221	6.492.023	-	-	-	6.677.700	6.489.824	-	-	-	99,81	99,97	-0,75%	0,00%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	28.887.300	50.421.100	45.440.678	64.829.330	-	28.867.900	50.403.100	44.498.200	64.429.800	-	99,93	99,96	97,93	99,38	22,40%	22,23%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	12.906.553.278	13.976.326.281	15.742.654.298	18.919.082.982	-	11.916.743.787	13.210.331.148	14.330.791.960	17.710.001.594	-	92,33	94,52	91,03	93,61	10,03%	10,41%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	12.467.434.928	13.627.189.981	15.227.825.481	18.658.330.138	-	11.499.641.187	12.862.440.992	13.828.447.834	17.450.109.331	-	92,24	94,39	90,81	93,52	10,60%	10,99%



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	373.210.270	253.569.400	423.315.498	204.411.148	-	351.308.500	252.519.256	413.136.996	204.224.151	-	94,13	99,59	97,60	99,91	-13,97%	-12,68%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	26.636.830	39.766.700	38.149.387	19.320.725	-	26.536.700	39.614.700	37.228.894	18.968.000	-	99,62	99,62	97,59	98,17	-7,71%	-8,05%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	39.271.250	55.800.200	53.363.932	37.020.971	-	39.257.400	55.756.200	51.978.236	36.700.112	-	99,96	99,92	97,40	99,13	-1,46%	-1,67%
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	76.660.329	59.676.581	-	-	-	56.800.100	43.620.150	-	-	-	74,09	73,09	-6,07%	0,00%
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	76.660.329	59.676.581	-	-	-	56.800.100	43.620.150	-	-	-	74,09	73,09	-6,07%	0,00%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	60.788.000	236.227.000	137.258.000	176.083.160	-	60.771.450	235.626.080	125.850.000	128.445.160	-	99,97	99,75	91,69	72,95	30,46%	20,57%
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	182.670.000	80.850.000	128.445.160	-	-	182.670.000	80.850.000	128.445.160	-	-	100,00	100,00	100,00	-8,43%	-8,43%
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	60.788.000	53.557.000	56.408.000	47.638.000	-	60.771.450	52.956.080	45.000.000	-	-	99,97	98,88	79,78	0,00	-5,91%	-100,00%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.426.041.312	2.107.130.075	2.924.510.336	2.488.480.855	-	1.361.046.350	2.076.006.700	2.427.576.297	2.291.064.996	-	95,44	98,52	83,01	92,07	14,93%	13,90%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	100.312.500	95.083.500	119.084.500	76.113.603	-	99.968.400	94.076.500	97.689.200	75.330.000	-	99,66	98,94	82,03	98,97	-6,67%	-6,83%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	749.498.752	1.253.215.515	1.358.942.146	1.336.684.576	-	743.296.100	1.224.913.400	1.224.910.350	1.145.092.900	-	99,17	97,74	90,14	85,67	15,56%	11,41%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	64.587.060	67.587.060	59.468.200	106.689.560	-	64.486.250	67.481.800	59.152.300	102.554.392	-	99,84	99,84	99,47	96,12	13,37%	12,30%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	78.734.000	-	-	-	-	23.807.500	-	-	-	-	30,24	-	0,00	0,00	-100,00%	-100,00%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	432.909.000	691.244.000	1.007.623.000	584.277.000	-	429.488.100	689.535.000	976.950.397	583.410.844	-	99,21	99,75	96,96	99,85	7,78%	7,96%
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	379.392.490	384.716.116	-	-	-	68.874.050	384.676.860	-	-	-	18,15	99,99	0,35%	0,00%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.771.646.195	1.806.395.819	2.173.784.585	2.464.883.761	-	1.767.215.900	1.751.176.150	1.612.312.970	2.412.852.800	-	99,75	96,94	74,17	97,89	8,61%	8,10%
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	471.229.000	27.889.000	1.010.000.000	811.516.000	-	470.012.800	27.760.000	888.000.000	765.940.000	-	99,74	99,54	87,92	94,38	14,56%	12,99%
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	-	148.669.500	241.427.450	259.990.100	393.106.801	-	148.542.000	240.100.000	110.300.000	392.621.000	-	99,91	99,45	42,42	99,88	27,52%	27,51%
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	978.379.655	1.438.634.969	850.074.485	1.226.890.129	-	975.293.300	1.385.396.150	560.292.970	1.220.965.800	-	99,68	96,30	65,91	99,52	5,82%	5,78%
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	173.368.040	98.444.400	53.720.000	33.370.831	-	173.367.800	97.920.000	53.720.000	33.326.000	-	100,00	99,47	100,00	99,87	-33,76%	-33,79%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	3.653.510.502	3.886.297.650	5.181.582.907	5.940.575.980	-	3.457.387.739	3.754.396.258	4.321.251.235	5.180.183.810	-	94,63	96,61	83,40	87,20	12,92%	10,64%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1.583.710.502	707.797.650	866.602.907	1.196.482.783	-	1.443.226.700	667.268.050	731.576.100	997.661.294	-	91,13	94,27	84,42	83,38	-6,77%	-8,82%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	1.039.000.000	1.158.000.000	1.309.800.000	1.279.708.737	-	990.186.039	1.092.868.208	1.241.881.135	1.078.257.516	-	95,30	94,38	94,81	84,26	5,35%	2,15%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	370.800.000	1.360.500.000	2.320.180.000	2.621.344.460	-	370.575.000	1.334.260.000	1.717.794.000	2.272.225.000	-	99,94	98,07	74,04	86,68	63,06%	57,36%



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	660.000.000	660.000.000	685.000.000	843.040.000	-	653.400.000	660.000.000	630.000.000	832.040.000	-	99,00	100,00	91,97	98,70	6,31%	6,23%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.750.131.757	2.413.428.198	4.352.647.667	2.898.581.705	-	1.717.811.915	2.375.644.570	3.281.320.890	2.544.208.727	-	98,15	98,43	75,39	87,77	13,44%	10,32%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	1.134.789.200	1.669.690.000	1.724.893.200	1.461.590.622	-	1.119.059.615	1.634.060.630	1.543.792.750	1.197.545.825	-	98,61	97,87	89,50	81,93	6,53%	1,71%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	363.542.557	342.988.198	1.848.715.467	945.376.619	-	360.210.300	342.295.100	1.079.511.340	907.585.952	-	99,08	99,80	58,39	96,00	26,99%	25,99%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	251.800.000	400.750.000	779.039.000	491.614.464	-	238.542.000	399.288.840	658.016.800	439.076.950	-	94,73	99,64	84,47	89,31	18,21%	16,48%
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	1.626.580.428	1.506.281.786	1.984.496.638	1.173.169.409	-	1.378.829.645	1.468.799.626	1.848.284.335	1.106.823.888	-	84,77	97,51	93,14	94,34	-7,84%	-5,35%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	184.951.428	206.768.786	275.366.156	24.933.409	-	148.993.545	172.488.838	173.530.356	24.933.409	-	80,56	83,42	63,02	100,00	-39,41%	-36,04%
	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	35.124.000	10.720.000	38.250.482	61.628.000	-	24.564.000	10.720.000	34.988.200	61.548.000	-	69,94	100,00	91,47	99,87	15,09%	25,81%
	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	1.406.505.000	1.288.793.000	1.670.880.000	1.086.608.000	-	1.205.272.100	1.285.590.788	1.639.765.779	1.020.342.479	-	85,69	99,75	98,14	93,90	-6,25%	-4,08%
	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	2.011.200.000	2.411.200.000	2.449.300.000	1.852.450.672	-	1.997.533.000	2.367.617.000	2.340.010.000	1.820.780.000	-	99,32	98,19	95,54	98,29	-2,03%	-2,29%
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	-	1.051.200.000	1.151.200.000	1.169.000.000	1.224.405.280	-	1.047.005.000	1.145.264.000	1.129.180.000	1.219.617.000	-	99,60	99,48	96,59	99,61	3,89%	3,89%
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	-	746.400.000	832.800.000	857.500.000	141.445.392	-	739.328.000	823.953.000	828.030.000	140.963.000	-	99,05	98,94	96,56	99,66	-34,02%	-33,92%
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	-	213.600.000	427.200.000	422.800.000	486.600.000	-	211.200.000	398.400.000	382.800.000	460.200.000	-	98,88	93,26	90,54	94,57	22,85%	21,50%
	Kegiatan Penataan Organisasi	-	556.333.426	543.770.367	890.220.762	414.975.321	-	534.957.835	533.150.753	856.936.465	397.995.822	-	96,16	98,05	96,26	95,91	-7,07%	-7,13%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	229.821.503	153.636.700	264.187.856	135.015.520	-	209.952.085	149.653.848	249.641.827	128.525.688	-	91,35	97,41	94,49	95,19	-12,45%	-11,55%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	163.281.160	158.243.627	175.723.292	92.159.350	-	162.959.400	157.626.225	168.324.021	90.061.891	-	99,80	99,61	95,79	97,72	-13,32%	-13,78%
	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-	163.230.763	231.890.040	223.476.919	120.508.632	-	162.046.350	225.870.680	214.407.290	115.909.675	-	99,27	97,40	95,94	96,18	-7,31%	-8,04%
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	-	-	140.708.004	40.130.541	-	-	-	138.799.382	39.719.895	-	-	-	98,64	98,98	-26,92%	0,00%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-	-	-	86.124.691	27.161.278	-	-	-	85.763.945	23.778.673	-	-	-	99,58	87,55	-25,06%	0,00%
	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	3.460.315.912	3.861.484.790	4.366.020.270	3.400.226.631	-	3.316.548.520	3.831.012.750	3.997.439.418	3.259.235.739	-	95,85	99,21	91,56	95,85	-0,44%	-0,43%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolanan	-	1.794.458.639	2.084.398.800	2.017.496.854	1.040.396.642	-	1.691.427.600	2.064.649.480	1.935.893.037	938.926.259	-	94,26	99,05	95,96	90,25	-12,74%	-13,68%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-	1.017.692.000	1.128.364.000	1.581.645.100	1.515.944.255	-	1.011.711.800	1.126.538.900	1.560.545.729	1.499.806.032	-	99,41	99,84	98,67	98,94	10,48%	10,34%
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-	648.165.273	648.721.990	766.878.316	843.885.734	-	613.409.120	639.824.370	501.000.652	820.503.448	-	94,64	98,63	65,33	97,23	6,82%	7,54%
	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	-	<b>8.827.819.779</b>	<b>0.569.204.671</b>	<b>4.910.358.888</b>	<b>7.389.718.551</b>	-	<b>8.675.773.490</b>	<b>10.448.643.370</b>	<b>4.331.427.341</b>	<b>6.839.801.905</b>	-	<b>98,28</b>	<b>98,86</b>	<b>88,21</b>	<b>92,56</b>	<b>-4,35%</b>	<b>-5,77%</b>



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	-	775.306.749	1.268.365.052	1.533.870.042	1.752.063.761	-	735.663.750	1.243.256.590	1.457.625.791	1.636.894.477	-	94,89	98,02	95,03	93,43	22,61%	22,13%
	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	-	182.146.320	364.655.422	421.592.506	282.777.987	-	182.007.500	360.127.350	414.121.774	274.445.947	-	99,92	98,76	98,23	97,05	11,62%	10,81%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-	159.517.610	614.575.430	689.478.572	655.852.905	-	158.475.350	599.688.900	658.275.476	618.975.748	-	99,35	97,58	95,47	94,38	42,40%	40,58%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-	433.642.819	289.134.200	422.798.964	813.432.869	-	395.180.900	283.440.340	385.228.541	743.472.782	-	91,13	98,03	91,11	91,40	17,03%	17,12%
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	5.581.393.498	6.027.473.016	-	3.167.012.455	-	5.537.475.100	6.018.909.364	-	2.978.781.073	-	99,21	99,86	0,00	0,00	-100,00%	-100,00%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-	402.520.053	688.031.730	-	1.958.312.455	-	387.599.600	684.836.364	-	1.771.506.073	-	96,29	99,54	0,00	0,00	-100,00%	-100,00%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	-	250.070.822	255.938.415	-	27.300.000	-	229.689.200	254.218.500	-	27.300.000	-	91,85	99,33	0,00	0,00	-100,00%	-100,00%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	-	4.928.802.623	5.083.502.871	-	1.181.400.000	-	4.920.186.300	5.079.854.500	-	1.179.975.000	-	99,83	99,93	0,00	0,00	-100,00%	-100,00%
	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	949.116.890	1.362.925.713	1.649.632.348	1.042.138.567	-	915.334.400	1.330.219.230	1.463.921.711	1.015.481.182	-	96,44	97,60	88,74	97,44	2,36%	2,63%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	-	516.051.960	803.146.163	684.614.299	455.223.355	-	508.863.100	795.215.110	602.534.231	444.572.905	-	98,61	99,01	88,01	97,66	-3,09%	-3,32%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	-	292.369.540	290.319.670	652.738.024	289.030.178	-	267.716.700	268.687.000	560.258.500	282.667.064	-	91,57	92,55	85,83	97,80	-0,29%	1,37%
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	-	140.695.390	269.459.880	312.280.025	297.885.034	-	138.754.600	266.317.120	301.128.980	288.241.213	-	98,62	98,83	96,43	96,76	20,63%	20,05%
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	-	1.522.002.642	1.910.440.890	1.726.856.498	1.428.503.768	-	1.487.300.240	1.856.258.186	1.409.879.839	1.208.645.173	-	97,72	97,16	81,64	84,61	-1,57%	-5,05%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-	1.391.565.550	1.747.284.460	1.634.727.539	1.396.358.054	-	1.364.666.000	1.719.943.180	1.332.698.724	1.205.865.573	-	98,07	98,44	81,52	86,36	0,09%	-3,05%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	-	-	13.023.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00%
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	-	130.437.092	150.132.950	92.128.959	32.145.714	-	122.634.240	136.315.006	77.181.115	2.779.600	-	94,02	90,80	83,78	8,65	-29,54%	-61,20%
	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	-	<b>1.855.374.751</b>	<b>2.763.785.000</b>	<b>1.805.769.450</b>	<b>1.680.571.117</b>	-	<b>1.742.796.528</b>	<b>2.669.981.608</b>	<b>1.709.525.355</b>	<b>1.660.898.351</b>	-	<b>93,93</b>	<b>96,61</b>	<b>94,67</b>	<b>98,83</b>	<b>-2,44%</b>	<b>-1,20%</b>
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	292.843.620	454.850.480	459.184.408	430.582.464	-	286.646.350	416.947.530	433.484.700	428.272.123	-	97,88	91,67	94,40	99,46	10,12%	10,56%
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-	134.187.730	215.103.800	223.876.236	84.699.119	-	129.849.950	177.815.270	206.393.900	84.244.600	-	96,77	82,66	92,19	99,46	-10,87%	-10,25%
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	-	101.496.475	133.048.800	155.600.135	168.202.619	-	100.859.100	132.685.720	152.359.700	166.708.663	-	99,37	99,73	97,92	99,11	13,46%	13,39%
	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-	57.159.415	106.697.880	79.708.037	177.680.726	-	55.937.300	106.446.540	74.731.100	177.318.860	-	97,86	99,76	93,76	99,80	32,78%	33,43%
	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	98.583.960	230.008.560	315.345.646	260.805.439	-	95.937.650	228.909.400	289.707.411	259.941.450	-	97,32	99,52	91,87	99,67	27,53%	28,30%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	-	45.835.130	107.041.760	100.806.028	139.396.406	-	44.101.500	106.345.000	88.229.100	139.168.650	-	96,22	99,35	87,52	99,84	32,06%	33,28%
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-	-	-	58.192.467	34.907.267	-	-	-	57.270.011	34.723.400	-	-	-	98,41	99,47	-11,99%	0,00%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-	52.748.830	122.966.800	156.347.151	86.501.766	-	51.836.150	122.564.400	144.208.300	86.049.400	-	98,27	99,67	92,24	99,48	13,16%	13,51%
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	1.260.395.163	1.707.785.710	620.587.282	521.577.481	-	1.161.452.625	1.662.843.690	595.538.837	514.584.281	-	92,15	97,37	95,96	98,66	-19,79%	-18,41%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	870.036.350	1.168.850.300	187.171.392	131.956.927	-	772.925.300	1.125.455.190	178.360.133	129.717.900	-	88,84	96,29	95,29	98,30	-37,59%	-35,99%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	-	220.317.390	282.342.250	288.696.490	275.865.142	-	219.234.525	281.980.300	276.364.055	272.251.601	-	99,51	99,87	95,73	98,69	5,78%	5,56%



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	170.041.423	256.593.160	144.719.400	113.755.412	-	169.292.800	255.408.200	140.814.649	112.614.780	-	99,56	99,54	97,30	99,00	-9,56%	-9,69%
	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	203.552.008	371.140.250	410.652.114	467.605.733	-	198.759.903	361.280.988	390.794.407	458.100.497	-	97,65	97,34	95,16	97,97	23,11%	23,21%
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	-	65.221.155	105.672.090	164.432.228	207.415.161	-	63.163.200	99.346.478	157.150.678	206.558.462	-	96,84	94,01	95,57	99,59	33,54%	34,48%
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	-	67.348.523	120.451.950	103.397.268	173.024.723	-	66.624.783	120.079.564	100.422.548	168.844.408	-	98,93	99,69	97,12	97,58	26,60%	26,17%
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	-	70.982.330	145.016.210	142.822.618	87.165.849	-	68.971.920	141.854.946	133.221.181	82.697.627	-	97,17	97,82	93,28	94,87	5,27%	4,64%
	<b>TOTAL</b>	<b>28.499.217.700</b>	<b>44.629.672.084</b>	<b>48.041.570.567</b>	<b>58.695.865.552</b>	<b>55.794.755.799</b>	<b>27.487.185.531</b>	<b>42.096.051.894</b>	<b>46.525.788.801</b>	<b>52.642.539.601</b>	<b>51.681.509.981</b>	<b>96,45</b>	<b>94,32</b>	<b>96,84</b>	<b>89,69</b>	<b>92,63</b>	<b>18,29%</b>	<b>17,10%</b>



#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan**

Kelompok sasaran layanan dalam rencana strategis adalah kelompok masyarakat/publik yang menjadi target dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kemudian ditetapkan didalam dokumen rencana strategis (renstra). Kelompok ini adalah pihak-pihak yang diharapkan dapat menerima manfaat langsung atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan rencana strategis tersebut.

Adapun rencana kelompok sasaran layanan yang direncanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam hal ini sebagai penerima layanan utama dalam bentuk dukungan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemerintahan serta pemenuhan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

2. Perangkat Daerah

Perangkat Daerah dalam hal ini sebagai mitra kerja dalam koordinasi dan pelaksanaan program pemerintah serta pengguna layanan administratif dan teknis.

3. Masyarakat Umum

Masyarakat umum dalam hal ini mencakup upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan cara pemberian insentif maupun dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan masyarakat.

4. Organisasi/Lembaga Masyarakat

Organisasi/lembaga masyarakat dalam hal ini dengan pemberian bantuan terhadap organisasi/lembaga masyarakat yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Bantuan tersebut dimaksudkan untuk membantu dalam pengembangan organisasi/Lembaga masyarakat tersebut.

5. Instansi Vertikal/Lembaga Lain

Instansi vertikal dan lembaga lain dalam hal ini terkait koordinasi lintas sektoral untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program-program daerah.



6. *Stakeholder/Sektor Tertentu*

Ini bisa mencakup layanan ataupun dukungan terhadap kelompok-kelompok tertentu baik di dalam/tingkat pemerintahan maupun non-pemerintahan yang berupa bantuan teknis maupun non-teknis.

**2.1.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan**

Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan dalam hal ini merujuk kepada pihak-pihak di luar instansi pemerintahan daerah yang bekerja sama untuk memberikan pelayanan kepada publik/masyarakat.

Adapun kemitraan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya mencakup kemitraan terkait pelayanan keamanan dan pelayanan kebersihan di perangkat daerah.

Selain kemitraan dibidang keamanan dan kebersihan, Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya juga menjalin kemitraan dibidang media massa terkait pemberitaan atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya khususnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Tujuan dari pelaksanaan kemitraan ini adalah untuk meningkatkan kualitas, efektifitas, serta efisiensi dalam pelaksanaan pelayanan publik.

**2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Permasalahan dan isu strategis di perangkat daerah dalam hal ini mencakup dari berbagai aspek, kualitas pelayanan publik dan masyarakat, pengelolaan sumber daya baik aparatur, keuangan maupun sarana dan prasarana serta efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan atau kesenjangan antara yang ideal dan yang belum ideal yang kemudian akan diintervensi melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah, sedangkan isu strategis adalah kondisi/hal yang harus diperhatikan/dikedepankan atau suatu permasalahan yang strategis yang akan diintervensi melalui tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah.



### **2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dari 11 (sebelas) Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya memiliki permasalahan dalam hal pelayanan yang kompleks. Masing-masing bagian memiliki permasalahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan. Tidak hanya faktor internal, faktor eksternal juga mempengaruhi dalam pelaksanaan kegiatan khususnya pelayanan. Pemetaan permasalahan pelayanan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat dalam tabel berikut:



**Tabel 2.10**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya**

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD	Bagian
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Dokumen LPPD/LKj SKPD, Dokumen LKjIP SKPD	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi 3. Data dukung dari seluruh Bagian	Data dukung dari seluruh <i>stakeholder</i>	Penyampaian data dukung yang tidak tepat waktu	Bagian Perencanaan dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi 3. Data dukung dari seluruh Bagian	Data dukung dari seluruh <i>stakeholder</i>	Penyampaian Data Dukung yang tidak tepat waktu	Bagian Perencanaan dan Keuangan
Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja)	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi 3. Data Dukung dari seluruh Bagian	Data dukung dari seluruh <i>stakeholder</i>	1. Kualitas SDM dalam penyusunan data perencanaan 2. Penyampaian data yang tidak tepat waktu	Bagian Perencanaan dan Keuangan
Perencanaan Keuangan	APBD Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Fasilitasi Penyusunan DPA 3. Data Dukung (RKA) dari Bagian 4. Pemahaman Bagian Tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	1. Sistem Operasi Perencanaan Anggaran dan Penatausahaan Keuangan 2. Peraturan terkait perencanaan keuangan	1. Kurangnya Pemahaman Bagian tentang penyusunan perencanaan keuangan 2. Belum tertampungnya keseluruhan standar harga satuan di sistem operasi	Bagian Perencanaan dan Keuangan
Penatusahaan Keuangan	Dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi 3. Data dukung dari seluruh Bagian	1. Sistem Operasi Perencanaan Anggaran dan Penatausahaan Keuangan 2. Peraturan terkait penatausahaan keuangan	1. Kurangnya Pemahaman SDM tentang penyusunan dokumen pertanggung jawaban berdasarkan aturan yang berlaku 2. Kurangnya Pemahaman SDM tentang penyusunan dokumen pertanggung jawaban	Bagian Perencanaan dan Keuangan



Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD	Bagian
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)		
					terkait kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi	
Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang / jasa yang masih tidak sesuai target</li> <li>Perangkat Daerah yang melakukan pengadaan barang/jasa secara elektronik 68,47%, masih 31,53% pengadaan dilakukan secara manual tidak melalui SPSE</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah</li> <li>Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa</li> <li>Standar Dokumen Pemilihan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya kompetensi yang dimiliki pelaku pengadaan</li> <li>Kurangnya Bimbingan teknis pengadaan Barang / Jasa untuk PPBJ</li> <li>Rapat Koordinasi dan monev Pengadaan barang / jasa yang masih minim anggaran</li> <li>Sistem / Aplikasi (berbagi pakai) pelaporan realisasi pengadaan barang / jasa.</li> <li>Pendampingan kepada PPK / PPBJ Perangkat Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Minimnya Anggaran untuk Diklat dan Uji Kompetensi.</li> <li>Tidak dilibatkannya Bagian Pengadaan Barang / Jasa dalam TAPD (khusus reviu perencanaan pengadaan)</li> <li>Minimnya Anggaran pemeliharaan / maintenance untuk aplikasi (berbagi pakai)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah tidak tepat waktu dalam menginput SIRUP</li> <li>Penetapan metode pengadaan yang tidak tepat</li> <li>Kurangnya pengetahuan dalam Penyusunan KAK / Spesifikasi teknis</li> <li>Rancangan kontrak, SSUK dan SSKK yang masih kurang tepat</li> <li>Masih kurang maksimalnya PPK dalam pengelolaan kontrak dan pencatatan e-kontrak</li> </ol>	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Pelaksanaan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2023 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa</li> <li>Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan seluruh informasi, sistem informasi pengadaan barang / jasa, dan infrastrukturnya</li> <li>Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang / jasa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah</li> <li>Penyedia</li> <li>LKPP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan pemahaman pengguna terhadap sistem</li> <li>Pelatihan yang kurang untuk pengguna</li> <li>Perubahan regulasi atau kebijakan yang memerlukan penyesuaian.</li> <li>Kekurangan fitur yang diinginkan oleh pengguna.</li> <li>Keterbatasan perangkat layanan LPSE</li> </ol>	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa



Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD	Bagian
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)		
		Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya				
Pelaksanaan Pembinaan Pelaku Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Masih minimnya pelaksanaan pembinaan pelaku pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah</li> <li>Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa</li> <li>Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan anggaran dalam melaksanakan pembinaan</li> <li>Tidak tersedianya SDM internal yang memiliki kompetensi sebagai Narasumber / Tenaga Ahli</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak memiliki kewenangan secara mandiri dalam menyelenggarakan pembinaan terkait pengembangan kompetensi pelaku pengadaan</li> <li>Hanya memiliki kewenangan menyelenggarakan pembinaan terkait bimtek / sosialisasi / diseminasi (dalam lingkup yang terbatas)</li> </ol>	Kurang terfasilitasinya pembinaan untuk pelaku pengadaan yang ada di perangkat daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban kerja dan Evaluasi Jabatan	Dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban kerja dan Evaluasi Jabatan	Permenpan RB Nomor 01 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 34 Tahun 2013	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung</li> <li>Koordinasi dan Konsultasi</li> <li>Data dukung dari seluruh Perangkat Daerah</li> </ol>	Data Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah	Proses penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan memakan waktu yang sangat panjang	Bagian Organisasi
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung</li> <li>Koordinasi dan Konsultasi</li> <li>Data dukung dari seluruh Perangkat Daerah</li> </ol>	Data Standar Kompetensi Jabatan Perangkat Daerah	Terbatasnya kemampuan Perangkat Daerah menyusun kompetensi teknis untuk seluruh jabatan	Bagian Organisasi
Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Dokumen Peraturan daerah tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah	PP Nomor 18 Tahun 2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung</li> <li>Koordinasi dan Konsultasi</li> <li>Data dukung dari seluruh Perangkat Daerah</li> </ol>	Data dukung dari seluruh <i>stakeholder</i>	Masih terdapat tugas dan fungsi di Perangkat Daerah yang tumpang tindih atau belum tepat ukuran dan tepat fungsi	Bagian Organisasi
Penyusunan Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah	Dokumen Peraturan SOTK Perangkat Daerah	Peraturan Daerah tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung</li> <li>Koordinasi dan Konsultasi</li> <li>Data dukung dari seluruh Perangkat Daerah</li> </ol>	Data dukung dari seluruh <i>stakeholder</i>	Masih terdapat tugas dan fungsi di Perangkat Daerah yang tumpang tindih atau belum tepat ukuran dan tepat fungsi	Bagian Organisasi
Penyusunan Profil Kelembagaan	Dokumen Profil Kelembagaan	Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung</li> <li>Koordinasi dan Konsultasi</li> <li>Data dukung dari seluruh Perangkat Daerah</li> </ol>	Data dukung dari seluruh <i>stakeholder</i>	Terbatasnya kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun profil kelembagaan.	Bagian Organisasi



Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD	Bagian
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)		
Penilaian Evaluasi Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Perangkat Daerah	Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 dan Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2018	1. Fasilitas, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi 3. Data dukung dari seluruh Perangkat Daerah	Data dukung dari seluruh stakeholder	Terbatasnya kemampuan Perangkat Daerah dalam melakukan penilaian mandiri.	Bagian Organisasi
Penyusunan Laporan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	Laporan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	1. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 2. Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012	1. Fasilitas, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi 3. Data dukung dari seluruh Perangkat Daerah	Data dukung dari seluruh stakeholder	1. Penyampaian data dukung yang tidak tepat waktu 2. Kurangnya Pemahaman SDM tentang penyusunan Laporan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	Bagian Organisasi
Penyusunan Tata Naskah Dinas	Dokumen Peraturan Bupati Tata Naskah Dinas	Permendagri Nomor 1 Tahun 2023	1. Fasilitas, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi	-	Proses koreksi yang Panjang.	Bagian Organisasi
Penyusunan Peta Proses Bisnis	Dokumen Peta Proses Bisnis	Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2018	1. Fasilitas, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi Data dukung dari seluruh Perangkat Daerah	Data dukung dari seluruh stakeholder	1. Penyampaian data dukung yang tidak tepat waktu 2. Kurangnya Pemahaman SDM tentang penyusunan Dokumen Peta Proses Bisnis	Bagian Organisasi
Penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023	1. Fasilitas, monitoring dan evaluasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi 3. Data dukung dari seluruh Perangkat Daerah	Data dukung dari seluruh stakeholder	Terbatasnya kemampuan Perangkat Daerah dalam melakukan penilaian mandiri.	Bagian Organisasi
Penyusunan Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Road Map Reformasi Birokrasi	1. Fasilitas, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi 3. Data dukung dari seluruh OPD	Data dukung dari seluruh stakeholder	1. Penyampaian data dukung yang tidak tepat waktu 2. Kurangnya Pemahaman SDM tentang penyusunan dokumen rencana aksi road map reformasi birokrasi	Bagian Organisasi
Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen Laporan Perjanjian Kinerja dan Dokumen Laporan	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pedoman penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan	1. Fasilitas, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi	Data dukung dari seluruh stakeholder	1. Penyampaian data dukung yang tidak tepat waktu	Bagian Organisasi



Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD	Bagian
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)		
	Kinerja Pemerintah Daerah	Kinerja dan Tatacara reuiu atas laporan kinerja	3. Data dukung dari seluruh OPD		2. Kurangnya Pemahaman SDM tentang penyusunan dokumen perjanjian kinerja dan laporan kinerja	
Penyusunan Laporan TPID	Laporan TPID	1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten / Kota Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi 2. SK Bupati Kubu Raya Nomor: 524 / Setda / 2023 Tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tanggal 9 Oktober 2023	1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung termasuk SDM. 2. Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Monitoring, Koordinasi dan Konsultasi. 3. Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi /HLM 4. Jumlah APBD	1. Data dukung kegiatan maupun Anggaran dari seluruh stakeholder selaku Tim TPID 2. Sinergitas oleh Para Kepala OPD dalam mendukung Program Pengendalian Inflasi.	1. Kualitas SDM dalam penyusunan laporan terbatas, sehingga penyusunan laporan baru bisa dibuat pada saat akhir tahun. 2. Penyampaian data dukung oleh OPD yang tidak tepat waktu. 3. Belum Optimal sinergisitas baik berupa data dukung maupun anggaran oleh para Anggota Tim dalam menjalankan program pengendalian inflasi	Bagian Pembangunan dan Perekonomian
Penyusunan Laporan TPAKD	Laporan TPAKD	Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor: 162 / SETDA / 2022 Tentang Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Tanggal 25 Februari 2022	1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi pusat dan daerah TPAKD 3. Data dukung dari seluruh Anggota TPAKD Kabupaten Kubu Raya	1. Data dukung dari seluruh stakeholder. 2. Sinergitas oleh Para Kepala OPD dalam mendukung Program Percepatan Akses Keuangan Daerah.	Belum didukung melalui Program di setiap OPD terkait.	Bagian Pembangunan dan Perekonomian
Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat SKPD	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi	Data dukung dari seluruh stakeholder	1. Belum adanya Ruang Tunggu Tamu SKPD 2. Terbatasnya SDM Pelayanan Tamu	Bagian Umum
Penyusunan Dokumen Pakta Integritas	Dokumen Pakta Integritas	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi 3. Data dukung dari seluruh ASN	Data dukung dari seluruh stakeholder	1. Kualitas SDM dalam penyusunan data perencanaan 2. Penyampaian data yang tidak tepat waktu	Bagian Umum
Penyusunan Dokumen Administrasi Kepegawaian	1. Data Umum Kepegawaian (DUK)	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi	1. Website e-Kinerja 2. Peraturan terkait Kepegawaian	1. Kurangnya jumlah SDM menangani Kepegawaian SKPD	Bagian Umum



Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD	Bagian
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)		
	2. Laporan SKP / e-Kinerja 3. Absensi Kepegawaian 4. Dokumen Cuti 5. Dokumen Kenaikan Berkala 6. Dokumen Kenaikan Pangkat		3. Data dukung dari seluruh ASN		2. Kurangnya pemahaman ASN tentang pelaporan e-Kinerja 3. Penyampaian data yang tidak tepat waktu 4. Kurangnya data yang dibutuhkan	
Penyusunan Dokumen Tambahan Penghasilan Pegawai	Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi 3. Data dukung dari seluruh Bagian	Peraturan terkait Tambahan Penghasilan Pegawai	1. Kurangnya jumlah SDM menangani Tambahan Penghasilan Pegawai 2. Penyampaian absensi ASN yang tidak tepat waktu	Bagian Umum
Penyusunan Laporan Jadwal Kegiatan Pimpinan	Jadwal Kegiatan Pimpinan	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	1. Fasilitasi, Sarana dan Prasarana Pendukung 2. Koordinasi dan Konsultasi	Data dukung dari seluruh <i>stakeholder</i>	1. Lambatnya penyampaian undangan kegiatan 2. Kurangnya koordinasi pada penetapan jadwal kegiatan 3. Mendadaknya penyampaian undangan kegiatan 4. Jadwal kegiatan tidak disertai undangan kegiatan 5. Kurangnya informasi kegiatan karena terkadang tidak disertai kontak yang dapat dihubungi	Bagian Umum
Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Data Umum Kepegawaian	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	Data dukung dari seluruh ASN	Data dukung dari seluruh <i>stakeholder</i>	Belum adanya Tenaga ASN yang di bawah Sub Koordinator Rumah Tangga SKPD Sekretariat Daerah	Bagian Umum
Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis untuk peningkatan kesejahteraan rakyat	Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji	-	1. Fasilitasi 2. Koordinasi	Data Dukung dari Desa dan Kecamatan	1. Kurangnya personil pengolah data dalam pelaksanaan fasilitasi Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji	Bagian Kesejahteraan Rakyat



Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD	Bagian
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)		
					2. Monitoring dan Evaluasi yang masih kurang dilaksanakan	
Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Lembaga Lainnya	Dokumen Perjanjian Kerjasama	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	1. Fasilitasi 2. Koordinasi dan Konsultasi	Data dukung untuk fasilitasi Kerjasama daerah dan Lembaga lainnya	Belum ditindak lanjutinya seluruh Kerjasama dengan perjanjian kerjasama	Bagian Kerjasama dan Pertanahan
Batas Wilayah	Batas Wilayah Kabupaten, dan Antar Kecamatan	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	1. Fasilitasi 2. Koordinasi dan Konsultasi 3. Pembinaan	Data dukung batas wilayah kecamatan dan desa	Sering terjadinya permasalahan tentang batas wilayah	Bagian Tata Pemerintahan
Produk Hukum Daerah, Pelayanan dan Kesadaran Hukum serta Publikasi Produk Hukum	Produk Hukum	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	1. Tenaga Publikasi 2. Koordinasi dan Konsultasi 3. Tenaga Penyusun Produk Hukum ( <i>Legal Drafting</i> )	1. Proses Penyusunan Produk Hukum di OPD 2. Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Taat kepada Peraturan Perundang-Undangan	1. Kurangnya Tenaga Publikasi 2. Belum Optimalnya Aplikasi JDIIH 3. Kurangnya Tenaga <i>Legal Drafting</i>	Bagian Hukum
Pengamanan Aset Pertanahan milik Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Tanah milik Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tugas Pokok dan Fungsi	1. Tenaga Teknis Lapangan 2. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung 3. Koordinasi Internal	1. Koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait 2. Sistem/Aplikasi dalam rangka Digitalisasi	Kurangnya Sumber Daya Aparatur	Bagian Kerjasama dan Pertanahan

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan indikasi permasalahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya aparatur dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) untuk pelaksanaan kegiatan;
2. Kurangnya pemahaman sumber daya aparatur dalam proses pelaksanaan kegiatan baik secara administrasi maupun dalam penggunaan aplikasi/sistem;
3. Kurang dan keterlambatan penyampaian data yang menyebabkan proses pelaksanaan kegiatan terhambat;
4. Kurang memadainya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan;
5. Masih banyaknya Standar Operasi Pelayanan (SOP) yang belum ditetapkan di perangkat daerah sehingga tidak memiliki alur yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan; dan



6. Masih belum dilaksanakannya hasil tindak lanjut evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebelumnya.

Adapun kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dalam mengantisipasi permasalahan tersebut adalah:

1. Penambahan sumber daya aparatur dalam hal ini PNS dan/atau PPPK sesuai dengan kebutuhan dan kekurangan di perangkat daerah;
2. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keilmuan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan berupa bimbingan teknis, seminar, dan workshop;
3. Penambahan dan perawatan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tugas dan fungsi;
4. Disusunnya Standar Operasi Pelayanan (SOP) pelaksanaan kegiatan;
5. Meningkatkan koordinasi antar bidang/bagian terkait dalam pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah; dan
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang lebih intens agar *output* kegiatan dapat terwujud dan tepat sasaran.

#### **2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang pengaruhnya signifikan bagi perangkat daerah sehingga harus mendapatkan prioritas perhatian yang memadai dalam perencanaan program dan kegiatan. Sangat penting untuk diperhatikan karena menentukan baik atau buruknya kinerja perangkat daerah. Jika isu tersebut berupa kelemahan/ancaman harus diantisipasi, dan jika isu tersebut berupa peluang/kekuatan dapat dimanfaatkan karena isu tersebut akan mengakibatkan perangkat daerah dapat meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih baik.



Adapun isu-isu strategis pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan publik yang belum optimal di Sekretariat Daerah.  
Hal ini dapat dilihat dari alur pelayanan dalam beberapa kegiatan masih belum jelas sehingga lambatnya pelayanan di perangkat daerah. Faktor utama yang menjadi penyebab atas lambatnya pelayanan tersebut adalah masih adanya Standar Operasi Pelayanan (SOP) yang belum disusun.
2. Kualitas manajemen kinerja perangkat daerah yang perlu lebih dioptimalkan.  
Hal ini dapat dilihat pada pencapaian target kinerja yang sering tidak sesuai atau tidak tepat waktu berdasarkan rencana aksi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Sehingga hal tersebut mempengaruhi persentase capaian kinerja pada perangkat daerah.
3. Perbedaan kebijakan pusat dan daerah.  
Hal ini dapat dilihat pada terdapatnya permasalahan atas pelaksanaan kegiatan akibat dari perbedaan/belum sinerginya aturan pusat dan daerah tersebut.
4. Masih banyaknya permasalahan dibidang pertanahan.  
Hal ini dapat dilihat dari belum banyaknya aset milik Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang belum memiliki legalitas hukum. Selain dari itu, masih banyaknya konflik masalah pertanahan yang melibatkan baik itu Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Pihak Swasta/Perusahaan, hingga masyarakat.
5. Keterbatasan anggaran dan kualitas sumber daya aparatur.  
Keterbatasan anggaran dan kualitas sumber daya aparatur dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan didalam rencana strategis.

**Tabel 2.11**  
**Perumusan Isu Strategis**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
-	Masih kurangnya sumber daya	-	-	-	-	Kualitas Pelayanan Publik yang



Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	aparatur dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) untuk pelaksanaan kegiatan					belum optimal di Sekretariat Daerah
	Kurangnya pemahaman sumber daya aparatur dalam proses pelaksanaan kegiatan baik secara administrasi maupun dalam penggunaan aplikasi/sistem					Kualitas manajemen kinerja perangkat daerah yang perlu lebih dioptimalkan
	Kurang dan keterlambatan penyampaian data yang menyebabkan proses pelaksanaan kegiatan terhambat					Perbedaan kebijakan pusat dan daerah
	Kurang memadainya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan					Masih banyaknya permasalahan dibidang pertanahan
	Masih banyaknya Standar Operasi Pelayanan (SOP) yang belum ditetapkan di perangkat daerah sehingga tidak memiliki alur yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan					Keterbatasan anggaran dan kualitas sumber daya aparatur
	Masih belum dilaksanakannya hasil tindak lanjut evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebelumnya					



## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Melihat kondisi dan situasi pada masa sekarang ini yang mengalami era globalisasi dan mengantisipasi tantangan pada masa yang akan datang, Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu organisasi Pemerintah dan Perangkat Daerah perlu terus menerus mengembangkan dan meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat.

Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya dirumuskan dengan memperhatikan visi Bupati/Wakil Bupati yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya tahun 2025-2029. Adapun **VISI** dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yaitu:

**“TERWUJUDNYA KUBU RAYA MELAJU”**

Yang dimaksud dengan Kubu Raya “**Melaju**” adalah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memberikan pelayanan yang maksimal untuk mewujudkan Kabupaten Kubu Raya maju dengan kondisi ekonomi yang produktif dan inklusif dengan diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi serta infrastruktur yang mantap.

Adapun dari visi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tersebut mempunyai **TAGLINE** yaitu:

**“KUBU RAYA MELAYANI UNTUK MAJU”**

Dalam memujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun pula misi yang merupakan dasar keberadaan suatu organisasi. Adapun **MISI** dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yaitu:

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Menerapkan Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* serta Berbasis Digitalisasi.
2. Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Kewilayahan dan Lingkungan yang Berkelanjutan.
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing dan Berbudaya.
4. Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera, Mandiri, dan Harmonis.

Dari penjabaran misi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya diatas, maka ditetapkan misi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya yaitu mendukung upaya dari **MISI KESATU** Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yaitu:



**“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Menerapkan Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* serta Berbasis Digitalisasi”**

**3.1. TUJUAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Selain itu, tujuan rencana strategis perangkat daerah juga untuk menyediakan arahan dan fokus dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama periode tahun 2025-2029.

Adapun **TUJUAN** Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya dalam rangka mendukung capaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya yaitu Sasaran didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

**3.2. SASARAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Adapun **SASARAN** Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029:

1. Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat
2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan



**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra (2024)	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun					
											2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	T.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IT.1	Nilai Indeks Pelayanan Publik					Indeks	A- (4,18)	A- (4,20)	A- (4,25)	A- (4,30)	A- (4,35)	A- (4,40)	A- (4,50)
					S.1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat	IS.1	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (76,35)	BB (76,50)	BB (77,00)	BB (77,50)	BB (78,00)	A (80,01)	A (82,00)
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	T.2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	IT.2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)					Poin	B (62,63)	B (65,00)	B (67,50)	B (70,00)	BB (72,50)	BB (75,00)	BB (77,50)
			IT.3	Opini BPK					Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
					S.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	IS.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	BB (76,95)	BB (78,50)	BB (79,80)	BB (80,10)	BB (80,22)	BB (80,35)	BB (80,41)



### 3.3. STRATEGI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisa terhadap gambaran pelayanan, permasalahan, isu strategi, serta pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan sehingga strategi menjadi lebih spesifik, konkret dan operasional.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi di internal perangkat daerah;
2. Meningkatkan kinerja pelayanan melalui dukungan sarana dan prasarana;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan keprotokolan;
4. Optimalisasi bantuan hukum kepada perangkat daerah dan pemerintahan desa;
5. Optimalisasi sistem informasi hukum daerah;
6. Meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa;
7. Optimalisasi pengadaan tanah untuk bangunan gedung kantor dan fasilitas umum;
8. Optimalisasi penyelesaian konflik dan sengketa masalah pertanahan;
9. Meningkatkan pengamanan aset tanah milik pemerintah kabupaten kubu raya.

**Tabel 3.2**  
**Tujuan, Sasaran, dan Strategi**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya**

Tujuan (1)		Sasaran (2)		Strategi (3)	
T.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	S.1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat	ST.1	Optimalisasi Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor dan Fasilitas Umum
				ST.2	Optimalisasi Penyelesaian Konflik dan Sengketa Masalah Pertanahan



Tujuan (1)		Sasaran (2)		Strategi (3)	
				ST.3	Meningkatkan Pengamanan Aset Tanah milik Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
T.2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	S.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	ST.4	Meningkatkan Koordinasi di Internal Perangkat Daerah
				ST.5	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Melalui Dukungan Sarana dan Prasarana
				ST.6	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum dan Keprotokolan
				ST.7	Optimalisasi Bantuan Hukum Kepada Perangkat Daerah
				ST.8	Optimalisasi Sistem Informasi Hukum Daerah
				ST.9	Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa

### 3.4. ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategis.

Kebijakan juga merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan perangkat daerah.



1. Pemanfaatan digitalisasi dalam proses pengaduan dan penyampaian kritik dan saran pelayanan publik;
2. Pemanfaatan digitalisasi dalam melakukan pemetaan aset tanah milik pemerintah kabupaten kubu raya;
3. Pemanfaatan digitalisasi dalam proses penyelesaian konflik dan sengketa masalah pertanahan;
4. Pemetaan dan penetapan lokasi pengadaan tanah;
5. Peningkatan publikasi dan konsultasi produk hukum daerah melalui sistem JDIH Kabupaten Kubu Raya;
6. Sosialisasi terkait akuntabilitas kinerja;
7. Peningkatan kapasitas aparatur pengadaan barang dan jasa melalui bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa;
8. Pemberian bantuan hukum atas perkara perdata dan tata usaha negara serta fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum;
9. Peningkatan koordinasi dengan *stakeholder* terkait baik internal maupun eksternal
10. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait guna mewujudkan kualitas pelayanan umum dan keprotokolan yang prima dan meningkatkan kemampuan teknis bidang pelayanan umum dan keprotokolan;
11. Peningkatan penyediaan dan pengadaan sarana dan prasarana yang optimal;
12. Pemanfaatan sistem/aplikasi berbasis web dalam manajemen kepegawaian;
13. Pengendalian dan pengawasan perencanaan dan evaluasi kinerja; dan
14. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui sosialisasi tentang perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.

**Tabel 3.3**  
**Perumusan Arah Kebijakan Rencana Strategis**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya**

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD		Arah Kebijakan Rencana Strategis		Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
		AK.2	Penerapan Inovasi dalam pelayanan publik	AK.1	Pemanfaatan digitalisasi dalam proses pengaduan dan penyampaian kritik dan saran pelayanan publik	
		AK.3	Penataan dan	AK.2	Pemanfaatan digitalisasi	



No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Rencana Strategis	Keterangan	
		peningkatan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi		dalam melakukan pemetaan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	
			AK.3	Pemanfaatan digitalisasi dalam proses penyelesaian konflik dan sengketa masalah masalah pertanahan	
			AK.4	Pemetaan dan penetapan lokasi pengadaan tanah	
			AK.5	Peningkatan publikasi dan konsultasi produk hukum daerah melalui sistem JDIH Kabupaten Kubu Raya	
		AK.4	Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kinerja aparatur	AK.6	Sosialisasi terkait akuntabilitas kinerja
				AK.7	Peningkatan kapasitas aparatur pengadaan barang dan jasa melalui bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa
				AK.8	Pemberian bantuan hukum atas perkara perdata dan tata usaha negara serta fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum
				AK.9	Peningkatan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait baik internal maupun eksternal
				AK.10	Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait guna mewujudkan



No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Rencana Strategis	Keterangan
				kualitas pelayanan umum dan keprotokolan yang prima dan meningkatkan kemampuan teknis bidang pelayanan umum dan keprotokolan
		AK.5	Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen ASN	AK.11 Peningkatan penyediaan dan pengadaan sarana dan prasarana yang optimal
				AK.12 Pemanfaatan sistem/aplikasi berbasis web dalam manajemen kepegawaian
		AK.6	Penyusunan perencanaan yang berkualitas, partisipatif dan tepat waktu	AK.13 Pengendalian dan pengawasan perencanaan dan evaluasi kinerja
				AK.14 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui sosialisasi tentang perencanaan, penganggaran, dan pelaporan

### 3.5. CASCADING KINERJA TAHUN 2025-2029

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran sasaran dan indikator kinerja dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya hingga turun ke tingkat unit kerja pelaksana teknis. Tujuan dari penyusunan cascading kinerja untuk memastikan bahwa seluruh bidang/sektor dalam perangkat daerah bekerja selaras dalam mencapai tujuan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain, cascading kinerja memastikan bahwa setiap bidang/sektor dalam perangkat daerah memahami tugas pokok dan fungsi mereka terhadap mencapai tujuan dan sasaran dari perangkat daerah tersebut.



**Tabel 3.4**  
**Cascading Kinerja**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya**

Masalah	Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Meta Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran	Meta Indikator
Masih Belum Maksimalnya Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Pelayanan Publik	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi
Masih Belum Optimalnya Kinerja Pemerintahan	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi Pelaksanaan SAKIP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Pelaksanaan AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Kubu Raya
			Opini BPK	Hasil Evaluasi Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)			



**Tabel 3.5**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya**

Tujuan (1)		Sasaran (2)		Strategi (3)		Arah Kebijakan (4)	
T.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	S.1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat	ST.1	Optimalisasi Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung Kantor dan Fasilitas Umum	AK.1	Pemetaan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah
				ST.2	Optimalisasi Penyelesaian Konflik dan Sengketa Masalah Pertanahan	AK.2	Pemanfaatan Digitalisasi dalam Proses Penyelesaian Konflik dan Sengketa Masalah Pertanahan
				ST.3	Meningkatkan Pengamanan Aset Tanah milik Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	AK.3	Pemanfaatan Digitalisasi dalam Melakukan Pemetaan Aset Tanah milik Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
						AK.4	Peningkatan Koordinasi dengan <i>Stakeholder</i> terkait baik Internal maupun Eksternal
T.2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	S.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	ST.4	Meningkatkan Koordinasi di Internal Perangkat Daerah	AK.5	Pengendalian dan Pengawasan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
						AK.6	Sosialisasi Terkait Akuntabilitas Kinerja
				ST.5	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Melalui Dukungan Sarana dan Prasarana	AK.7	Peningkatan Penyediaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Efektif



Tujuan (1)		Sasaran (2)		Strategi (3)		Arah Kebijakan (4)	
				ST.6	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum dan Keprotokolan	AK.8	Peningkatan Koordinasi dengan Instansi Terkait Guna Mewujudkan Kualitas Pelayanan Umum dan Keprotokolan yang Prima dan Meningkatkan Kemampuan Teknis Bidang Pelayanan Umum dan Keprotokolan
				ST.7	Optimalisasi Bantuan Hukum Kepada Perangkat Daerah	AK.9	Pemberian Bantuan Hukum atas Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara serta Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Hukum
				ST.8	Optimalisasi Sistem Informasi Hukum Daerah	AK.10	Peningkatan Publikasi dan Konsultasi Produk Hukum Daerah melalui Sistem JDIH Kabupaten Kubu Raya
				ST.7	Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	AK.11	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengadaan Barang dan Jasa melalui Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa



## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, maka perlu diimplementasikan kedalam program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan berdasarkan urusan yang ditangani Sekretariat Daerah dengan rincian sebagai dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 4.1**  
**Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Strategis**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan		Sasaran		Outcome		Output		Indikator Kinerja		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan	
									Indikator	Satuan			
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	T.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik							IT.1	Nilai Indeks Pelayanan Publik	Poin		
			S.1	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat					IS.1	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks		
					OC.1	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan			IOC.1	Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan Melalui Mediasi	%	P.1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
							OT.1	Jumlah Pelaksanaan Upaya Penyelesaian Kasus Pertanahan				K.1	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten / Kota
									IOT.1	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Berita Acara	SK.1	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
									IOT.2	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Dokumen	SK.2	Sub Kegiatan Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan		Sasaran		Outcome		Output		Indikator Kinerja		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Keterangan	
									Indikator	Satuan				
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)		(9)	
					OC.2	Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan			IOC.2	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	P.2	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	
							OT.2	Luas Lahan Kebutuhan Pembangunan				K.2	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	
									IOT.3	Jumlah Keputusan Bupati / Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Dokumen	SK.3	Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	
									IOT.4	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Dokumen	SK.4	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	
					OC.3	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)			IOC.3	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Disistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	P.3	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan		Sasaran		Outcome		Output		Indikator Kinerja		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Keterangan	
									Indikator	Satuan				
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)		(9)	
							OT.3	Persentase Fasilitasi Penetapan Subjek Redistribusi Tanah				K.3	Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	
									IOT.5	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	Dokumen	SK.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	
									IOT.6	Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	Berita Acara	SK.6	Sub Kegiatan Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	
									IOT.7	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	Berita Acara	SK.7	Sub Kegiatan Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	
									IOT.8	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten / Kota	Laporan	SK.8	Sub Kegiatan Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten / Kota	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan		Sasaran		Outcome		Output		Indikator Kinerja		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Keterangan	
									Indikator	Satuan				
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)		(9)	
									IOT.9	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	Dokumen	SK.9	Sub Kegiatan Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	
					OC.4	Meningkatnya Tata Kelola Tanah Ulayat			IOC.4	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan	%	P.4	Program Penetapan Tanah Ulayat	
							OT.4	Jumlah Bidang Tanah Ulayat yang diinventarisasi				K.4	Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten / Kota	
									IOT.10	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Laporan	SK.10	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	
					OC.5	Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong			IOC.5	Persentase Pengamanan Tanah Kosong Aset Pemerintah Daerah	%	P.5	Program Pengelolaan Tanah Kosong	
							OT.5	Jumlah Bidang Tanah yang Telah Dilakukan Inventarisasi				K.5	Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	
									IOT.11	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota yang Diinventarisasi	Laporan	SK.11	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan		Sasaran		Outcome		Output		Indikator Kinerja		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Keterangan	
									Indikator	Satuan				
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)		(9)	
					OC.6	Meningkatnya Pengelolaan Izin Membuka Tanah			IOC.6	Persentase Penyampaian Informasi Pengelolaan Izin Membuka Tanah	%	P.6	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	
							OT.6	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah				K.6	Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah	
									IOT.12	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Dokumen	SK.12	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	
					OC.7	Meningkatnya Tertib Pertanahan dan Kepastian Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah			IOC.7	Persentase Penatagunaan Tanah yang Diselesaikan	%	P.7	Program Penatagunaan Tanah	
							OT.7	Jumlah Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah Daerah				K.7	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten / Kota	
									IOT.13	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten / Kota	Dokumen	SK.13	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten / Kota	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan		Sasaran		Outcome		Output		Indikator Kinerja		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Keterangan
									Indikator	Satuan			
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)		(9)
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	T.2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan							IT.2	Nilai SAKIP	Poin		
									IT.3	Opini BPK	Predikat		
			S.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan					IS.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin		
					OC.8	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			IOC.8	Nilai SAKIP	Poin	P.8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
							OT.8	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				K.8	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
									IOT.14	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	SK.14	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
									IOT.15	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	SK.15	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
									IOT.16	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen	SK.16	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan		Sasaran		Outcome		Output		Indikator Kinerja		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Keterangan
									Indikator	Satuan			
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)		(9)
										Perubahan RKA-SKPD			
									IOT.17	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	SK.17	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
									IOT.18	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	SK.18	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
									IOT.19	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	SK.19	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
									IOT.20	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	SK.20	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan		Sasaran		Outcome		Output		Indikator Kinerja		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Keterangan	
									Indikator	Satuan				
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)		(9)	
									IOT.21	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	SK.21	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
							OT.9	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				K.9	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
									IOT.22	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	SK.22	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
									IOT.23	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	SK.23	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
									IOT.24	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	SK.24	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
									IOT.25	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	SK.25	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan		Sasaran		Outcome		Output		Indikator Kinerja		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Keterangan	
									Indikator	Satuan				
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)		(9)	
							OT.10	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				K.10	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
									IOT.26	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	SK.26	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
									IOT.27	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	SK.27	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	
							OT.11	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Difasilitasi				K.11	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
									IOT.28	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	SK.28	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
									IOT.29	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	SK.29	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
									IOT.30	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	SK.30	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
									IOT.31	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	SK.31	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan		Sasaran		Outcome		Output		Indikator Kinerja		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Keterangan	
									Indikator	Satuan				
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)		(9)	
							OT.12	Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				K.12	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
									IOT.32	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	SK.32	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	
									IOT.33	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	SK.33	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
									IOT.34	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	SK.34	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
									IOT.35	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	SK.35	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
									IOT.36	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	SK.36	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
							OT.13	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah				K.13	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan		Sasaran		Outcome		Output		Indikator Kinerja		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Keterangan	
									Indikator	Satuan				
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)		(9)	
									IOT.37	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	SK.37	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
									IOT.38	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	SK.38	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
									IOT.39	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	SK.39	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
									IOT.40	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	SK.40	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
							OT.14	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				K.14	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
									IOT.41	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	SK.41	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
									IOT.42	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	SK.42	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
									IOT.43	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	SK.43	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan		Sasaran		Outcome		Output		Indikator Kinerja		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Keterangan	
									Indikator	Satuan				
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)		(9)	
									IOT.44	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	SK.44	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
							OT.15	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara				K.15	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
									IOT.45	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	SK.45	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
									IOT.46	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	SK.46	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
									IOT.47	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	SK.47	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
							OT.16	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				K.16	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan		Sasaran		Outcome		Output		Indikator Kinerja		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Keterangan	
									Indikator	Satuan				
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)		(9)	
									IOT.48	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang / Bulan	SK.48	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
									IOT.49	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	SK.49	Sub Kegiatan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
									IOT.50	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang / Bulan	SK.50	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
							OT.17	Jumlah Paket Pelayanan Fasilitasi Kerumahtanggaan				K.17	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
									IOT.51	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	SK.51	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
									IOT.52	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	SK.52	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
									IOT.53	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	SK.53	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan		Sasaran		Outcome		Output		Indikator Kinerja		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Keterangan	
									Indikator	Satuan				
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)		(9)	
							OT.18	Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi				K.18	Kegiatan Penataan Organisasi	
									IOT.54	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	SK.54	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
									IOT.55	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	SK.55	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
									IOT.56	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	SK.56	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
									IOT.57	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	SK.57	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
									IOT.58	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	SK.58	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
							OT.19	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				K.19	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
									IOT.59	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	SK.59	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan		Sasaran		Outcome		Output		Indikator Kinerja		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Keterangan	
									Indikator	Satuan				
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)		(9)	
									IOT.60	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	SK.60	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
									IOT.61	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	SK.61	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	
					OC.9	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			IOC.9	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan yang Terlaksana	%	P.9	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	
							OT.20	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Tata				K.20	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	
									IOT.62	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	SK.62	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	
									IOT.63	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	SK.63	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
									IOT.64	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	SK.64	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
							OT.21	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				K.21	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan		Sasaran		Outcome		Output		Indikator Kinerja		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Keterangan	
									Indikator	Satuan				
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)		(9)	
									IOT.65	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	SK.65	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
									IOT.66	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	SK.66	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan		Sasaran		Outcome		Output		Indikator Kinerja		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Keterangan		
									Indikator	Satuan				
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		
									IOT.67	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	SK.67	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
							OT.22	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				K.22	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
									IOT.68	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	SK.68	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
									IOT.69	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	SK.69	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	
									IOT.70	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	SK.70	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan		Sasaran		Outcome		Output		Indikator Kinerja		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Keterangan	
									Indikator	Satuan				
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)		(9)	
							OT.23	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Daerah				K.23	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
									IOT.71	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	SK.71	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
									IOT.72	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	SK.72	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	
									IOT.73	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	SK.73	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
					OC.10	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan			IOC.10	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana	%	P.10	Program Perekonomian dan Pembangunan	
							OT.24	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Daerah				K.24	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
									IOT.74	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	SK.74	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD, dan BLUD	
									IOT.75	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	SK.75	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan		Sasaran		Outcome		Output		Indikator Kinerja		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Keterangan	
									Indikator	Satuan				
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)		(9)	
									IOT.76	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	SK.76	Sub Kegiatan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	
									IOT.77	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Dokumen	SK.77	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	
							OT.25	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan				K.25	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
									IOT.78	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	SK.78	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
									IOT.79	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	SK.79	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
									IOT.80	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	SK.80	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
							OT.26	Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				K.26	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan		Sasaran		Outcome		Output		Indikator Kinerja		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Keterangan	
									Indikator	Satuan				
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)		(9)	
									IOT.81	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	SK.81	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
									IOT.82	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	SK.82	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
									IOT.83	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	SK.83	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
							OT.27	Persentase Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				K.27	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
									IOT.84	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	SK.84	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	
									IOT.85	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya	Dokumen	SK.85	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan (1)	Tujuan (2)		Sasaran (3)		Outcome (4)		Output (5)		Indikator Kinerja		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (8)		Keterangan (9)
									Indikator (6)	Satuan (7)			
									Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				
								IOT.86	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	SK.86	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	

Dari hasil pemetaan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tersebut, dapat dilihat pada tabel diatas bahwa dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029 Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya maka ditetapkan urusan yang ditangani di Sekretariat Daerah terdiri dari 2 (dua) urusan, yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dan Urusan Sekretariat Daerah. Dari urusan tersebut, ditetapkan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) program, 27 (dua puluh tujuh) kegiatan, dan 86 (delapan puluh enam) sub kegiatan.

Dari perumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan diatas, maka ditetapkan rencana pendanaan untuk pelaksanaan seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya didalam rencana strategis periode 2025-2029.



**Tabel 4.2**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya**

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
		Indikator	Satuan		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.104	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Terelesainya Kasus Tanah Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi	%	100	100	346.593.203,32	100	363.922.863,48	100	382.119.006,66	100	401.224.956,99	100	421.286.204,84	100	1.915.146.235,29	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	
2.104.01	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Upaya Penyelesaian Kasus Pertanahan	Kasus	6	13	346.593.203,32	13	363.922.863,48	13	382.119.006,66	13	401.224.956,99	13	421.286.204,84	65	1.915.146.235,29	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	
2.104.01.4	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Berita Acara	3	13	288.456.156,00	4	302.830.664,00	4	317.972.197,00	4	333.870.806,00	4	350.564.346,99	29	1.593.694.169,99	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
2.104.01.5	Sub Kegiatan Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	58.137.047,32	1	61.092.199,48	1	64.146.809,66	1	67.354.150,99	1	70.721.857,85	5	321.452.065,30	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
2.105	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	100	100	1.887.631.859,21	100	1.982.013.452,17	100	2.081.114.124,78	100	2.185.169.831,02	100	2.294.428.322,57	100	10.430.357.589,75	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	
2.105.1	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Luas Lahan Kebutuhan Pembangunan	m2	n/a	2000	1.887.631.859,21	2100	1.982.013.452,17	2200	2.081.114.127,78	2300	2.185.169.831,02	2400	2.294.428.322,57	11000	10.430.357.589,75	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	
2.105.1.1	Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Dokumen	1	1	315.048.265,00	1	325.800.678,00	1	337.090.712,00	1	348.945.248,00	1	361.392.510,00	5	1.688.277.413,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
2.105.1.2	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1.572.583.594,21	1	1.656.212.774,17	1	1.744.023.412,78	1	1.836.224.583,02	1	1.933.035.812,57	5	8.742.080.176,75	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
2.106	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	n/a	100	135.347.604,14	100	142.114.984,34	100	149.220.733,56	100	156.681.770,24	100	164.515.858,75	100	747.880.951,03	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029**

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
		Indikator	Satuan		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.106.01	Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Subjek Tanah	Orang	n/a	100	135.347.604,14	120	142.114.984,34	140	149.220.733,56	160	156.681.770,24	180	164.515.858,75	700	747.880.951,03	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	
2.106.01.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	Dokumen	n/a	1	38.645.597,14	1	40.577.882,00	1	42.606.770,85	1	44.737.109,39	1	46.973.964,86	5	213.541.324,24	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
2.106.01.6	Sub Kegiatan Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Berita Acara	n/a	1	40.646.055,00	1	42.678.352,50	1	44.812.275,12	1	47.052.883,63	1	49.405.527,81	5	224.595.094,06		Kabupaten Kubu Raya
2.106.01.7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan	n/a	1	56.055.952,00	1	58.858.749,84	1	61.801.687,59	1	64.891.777,22	1	68.136.366,08	5	309.744.532,73	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
2.107	<b>PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT</b>	<b>Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan</b>	%	n/a	100	106.252.486,34	100	111.565.110,66	100	117.143.366,19	100	123.000.534,50	100	129.150.561,22	100	587.112.058,91	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	
2.107.1	Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bidang Tanah Ulayat yang diinventarisasi	Bidang Tanah	n/a	20	106.252.486,34	25	111.565.110,66	30	117.143.366,19	35	123.000.534,50	40	129.150.561,22	150	587.112.058,91	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	
2.107.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	n/a	1	106.252.486,34	1	111.565.110,66	1	117.143.366,19	1	123.000.534,50	1	129.150.561,22	5	587.112.058,91	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
2.108	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	<b>Persentase Tanah Kosong yang Dikelola</b>	%	100	100	200.338.301,39	100	210.355.216,46	100	220.872.977,29	100	231.916.626,15	100	243.512.457,46	100	1.106.995.578,75	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	
2.108.2	Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Bidang Tanah yang Telah Dilakukan Inventarisasi	Bidang Tanah	128	7	200.338.301,39	130	210.355.216,46	135	220.872.977,29	140	231.916.626,15	145	243.512.457,46	557	1.106.995.578,75	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	
2.108.2.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	Laporan	1	1	200.338.301,39	1	210.355.216,46	1	220.872.977,29	1	231.916.626,15	13	243.512.457,46	17	1.106.995.578,75	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
2.109	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	<b>Persentase Penyampaian Informasi Pengelolaan Izin Membuka Tanah</b>	%	100	100	49.548.483,37	100	52.025.907,54	100	54.627.202,92	100	57.358.563,06	100	60.226.491,22	100	273.786.648,11	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	
2.109.1	Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Kegiatan	1	3	49.548.483,37	3	52.025.907,54	3	54.627.202,92	4	57.358.563,06	4	60.226.491,22	17	273.786.648,11	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	
2.109.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Dokumen	1	1	49.548.483,37	1	52.025.907,54	1	54.627.202,92	1	57.358.563,06	1	60.226.491,22	5	273.786.648,11	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya





**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029**

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
		Indikator	Satuan		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4010119	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	n/a	22	16.553.116,32	22	17.380.769,88	22	18.249.814,08	22	19.162.298,98	22	20.120.417,33	110	91.466.416,59	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
40102	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>25.942.985.606,00</b>	<b>12</b>	<b>27.226.366.578,00</b>	<b>12</b>	<b>28.602.830.044,00</b>	<b>12</b>	<b>30.048.116.687,00</b>	<b>12</b>	<b>31.565.667.659,00</b>	<b>60</b>	<b>143.385.966.574,00</b>	<b>Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya</b>	
401021	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	1438	115	25.376.673.907,00	120	26.631.739.295,00	125	27.978.471.397,00	130	29.392.540.106,00	135	30.877.312.249,00	625	140.256.736.954,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
401022	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5000	5000	465.647.048,00	5000	488.929.400,00	5000	513.375.870,00	5000	539.044.664,00	5000	565.996.897,00	25000	2.572.993.879,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
401025	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	41.964.326,00	1	44.062.542,00	1	46.265.669,00	1	48.578.953,00	1	51.007.901,00	5	231.879.391,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
401027	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	17	17	58.700.325,00	17	61.635.341,00	17	64.717.108,00	17	67.952.964,00	17	71.350.612,00	85	324.356.350,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
40103	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>57.229.124,00</b>	<b>8</b>	<b>60.090.580,00</b>	<b>8</b>	<b>63.095.109,00</b>	<b>8</b>	<b>66.249.865,00</b>	<b>8</b>	<b>69.562.358,00</b>	<b>40</b>	<b>316.227.036,00</b>	<b>Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya</b>	
401035	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	n/a	7	29.000.000,00	7	30.450.000,00	7	31.972.500,00	7	33.571.125,00	7	35.249.681,00	35	160.243.306,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
401036	Sub Kegiatan Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	28.229.124,00	1	29.640.580,00	1	31.122.609,00	1	32.678.740,00	1	34.312.677,00	5	155.983.730,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
40105	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Aparatur Sipil Negara yang Difasilitasi</b>	<b>Orang</b>	<b>111</b>	<b>115</b>	<b>268.953.875,00</b>	<b>120</b>	<b>282.401.569,00</b>	<b>125</b>	<b>296.521.647,00</b>	<b>130</b>	<b>311.347.730,00</b>	<b>135</b>	<b>326.915.115,00</b>	<b>625</b>	<b>1.486.139.936,00</b>	<b>Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya</b>	
401051	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	n/a	2	8.516.993,00	2	8.942.843,00	2	9.389.985,00	2	9.859.484,00	2	10.352.458,00	10	47.061.763,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
401052	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	126.280.000,00	1	132.594.000,00	1	139.223.700,00	1	146.184.885,00	1	153.494.129,00	5	697.776.714,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
401053	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	n/a	2	44.064.882,00	2	46.268.126,00	2	48.581.532,00	2	51.010.609,00	2	53.561.139,00	10	243.486.288,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029**

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.01.05.1	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	17	90.092.000,00	20	94.596.600,00	25	99.326.430,00	30	104.292.752,00	35	109.507.389,00	127	497.815.171,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
<b>4.01.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Bulan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>2.133.437.091,00</b>	<b>12</b>	<b>2.240.108.946,00</b>	<b>12</b>	<b>2.352.114.393,00</b>	<b>12</b>	<b>2.469.720.112,00</b>	<b>12</b>	<b>2.593.206.118,00</b>	<b>60</b>	<b>11.788.586.660,00</b>	<b>Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya</b>	
4.01.06.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	76.127.619,00	4	79.934.000,00	4	83.930.700,00	4	88.127.235,00	4	92.533.597,00	20	420.653.151,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
4.01.06.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	1.128.160.585,00	5	1.184.568.614,00	5	1.243.797.045,00	5	1.305.986.897,00	5	1.371.286.242,00	24	6.233.799.383,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
4.01.06.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	50.539.815,00	12	53.066.806,00	12	55.720.146,00	12	58.506.153,00	12	61.431.461,00	60	279.264.381,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
4.01.06.9	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	450	434	804.306.800,00	565	844.522.140,00	735	886.748.247,00	955	931.085.659,00	1240	977.639.942,00	3929	4.444.302.788,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
4.01.06.1	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	74.302.272,00	1	78.017.386,00	1	81.918.255,00	1	86.014.168,00	1	90.314.876,00	5	410.566.957,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
<b>4.01.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Unit</b>	<b>248</b>	<b>231</b>	<b>1.432.550.434,00</b>	<b>231</b>	<b>1.504.177.956,00</b>	<b>231</b>	<b>1.579.386.853,00</b>	<b>231</b>	<b>1.658.356.197,00</b>	<b>231</b>	<b>1.741.274.006,00</b>	<b>1155</b>	<b>7.915.745.446,00</b>	<b>Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya</b>	
4.01.07.2	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4	1	825.000.000,00	1	866.250.000,00	1	909.562.500,00	1	955.040.625,00	1	1.002.792.656,00	5	4.558.645.781,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
4.01.07.5	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	165	30	105.547.595,00	30	110.824.975,00	30	116.366.223,00	30	122.184.535,00	30	128.293.761,00	150	583.217.089,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
4.01.07.6	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	79	50	202.465.913,00	50	212.589.209,00	50	223.218.669,00	50	234.379.603,00	50	246.098.583,00	250	1.118.751.977,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
4.01.07.0	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	52	150	299.536.926,00	150	314.513.772,00	150	330.239.461,00	150	346.751.434,00	150	364.089.006,00	750	1.655.130.599,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
<b>4.01.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>8.832.537.924,00</b>	<b>48</b>	<b>9.274.164.821,00</b>	<b>48</b>	<b>9.737.873.062,00</b>	<b>48</b>	<b>10.224.766.714,00</b>	<b>48</b>	<b>10.736.005.051,00</b>	<b>240</b>	<b>48.805.347.572,00</b>	<b>Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya</b>	
4.01.08.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	702.198.816,00	12	737.308.757,00	12	774.174.195,00	12	812.882.904,00	12	853.527.050,00	60	3.880.091.722,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
4.01.08.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	1.344.000.000,00	12	1.411.200.000,00	12	1.481.760.000,00	12	1.555.848.000,00	12	1.633.640.400,00	60	7.426.448.400,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029**

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4010083	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	2.274.219.590,00	12	2.387.930.570,00	12	2.507.327.098,00	12	2.632.693.453,00	12	2.764.328.126,00	60	12.566.498.837,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
4010084	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	4.512.119.518,00	12	4.737.725.494,00	12	4.974.611.769,00	12	5.223.342.357,00	12	5.484.509.475,00	60	24.932.308.613,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
401009	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>	<b>Unit</b>	<b>243</b>	<b>243</b>	<b>3.568.733.933,00</b>	<b>243</b>	<b>3.747.170.630,00</b>	<b>243</b>	<b>3.934.529.161,00</b>	<b>243</b>	<b>4.131.255.619,00</b>	<b>243</b>	<b>4.337.818.400,00</b>	<b>1215</b>	<b>19.719.507.743,00</b>	<b>Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya</b>	
4010092	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	57	57	1.560.084.434,00	57	1.638.088.656,00	57	1.719.993.088,00	57	1.805.992.743,00	57	1.896.292.380,00	285	8.620.451.301,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
4010099	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	1	1.388.927.933,00	1	1.458.374.330,00	1	1.531.293.046,00	1	1.607.857.698,00	1	1.688.250.583,00	5	7.674.703.590,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
4010090	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	185	185	619.721.566,00	185	650.707.644,00	185	683.243.027,00	185	717.405.178,00	185	753.275.437,00	925	3.424.352.852,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
401011	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>1.710.703.156,00</b>	<b>12</b>	<b>1.810.006.622,00</b>	<b>12</b>	<b>1.885.361.815,00</b>	<b>12</b>	<b>1.964.484.767,00</b>	<b>12</b>	<b>2.047.563.867,00</b>	<b>60</b>	<b>9.418.120.227,00</b>	<b>Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya</b>	
4010111	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang / Bulan	2	2	275.366.156,00	2	302.902.772,00	2	302.902.772,00	2	302.902.772,00	2	302.902.772,00	10	1.486.977.244,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
4010112	Sub Kegiatan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Paket	2	2	103.640.000,00	2	108.822.000,00	2	114.263.100,00	2	119.976.255,00	2	125.975.068,00	10	572.676.423,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
4010114	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang / Bulan	50	8	1.331.697.000,00	10	1.398.281.850,00	15	1.468.195.943,00	20	1.541.605.740,00	25	1.618.686.027,00	78	7.358.466.560,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
401012	<b>Kegiatan Fasilitas Kerumahaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Jumlah Paket Pelayanan Fasilitas Kerumahaan</b>	<b>Paket</b>	<b>25</b>	<b>36</b>	<b>2.435.400.000,00</b>	<b>36</b>	<b>2.557.170.000,00</b>	<b>36</b>	<b>2.685.028.500,00</b>	<b>36</b>	<b>2.819.279.925,00</b>	<b>36</b>	<b>2.960.243.921,00</b>	<b>180</b>	<b>13.457.122.346,00</b>	<b>Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya</b>	
4010121	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	4	4	1.205.600.000,00	4	1.265.880.000,00	4	1.329.174.000,00	4	1.395.632.700,00	4	1.465.414.335,00	20	6.661.701.035,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
4010122	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	4	862.400.000,00	4	905.520.000,00	4	950.796.000,00	4	998.335.800,00	4	1.048.252.590,00	20	4.765.304.390,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
4010123	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	4	4	367.400.000,00	4	385.770.000,00	4	405.058.500,00	4	425.311.425,00	4	446.576.996,00	20	2.030.116.921,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029**

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan					Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Data Capaian pada Tahun Awal Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
										Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029				Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
4.01.13	<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>					<b>Jumlah Perangkat Daerah Difasilitasi</b>	<b>OPD</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>568.397.382,00</b>	<b>37</b>	<b>596.817.251,00</b>	<b>37</b>	<b>626.658.113,00</b>	<b>37</b>	<b>657.991.019,00</b>	<b>37</b>	<b>690.890.570,00</b>	<b>185</b>	<b>3.140.754.335,00</b>	<b>Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya</b>		
4.01.13.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					Jumlah Dokumen Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	4	5	189.475.228,00	5	198.948.989,00	4	208.896.439,00	4	219.341.261,00	5	230.308.324,00	23	1.046.970.241,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya	
4.01.13.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					Jumlah Laporan Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	4	2	131.848.002,00	2	138.440.402,00	2	145.362.422,00	2	152.630.543,00	2	160.262.070,00	10	728.543.439,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya	
4.01.13.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	3	1	156.608.872,00	2	164.439.316,00	2	172.661.281,00	2	181.294.345,00	2	190.359.063,00	9	865.362.877,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya	
4.01.13.04	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	4	2	57.600.134,00	2	60.480.141,00	2	63.504.148,00	2	66.679.355,00	2	70.013.323,00	10	318.277.101,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya	
4.01.13.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	1	2	32.865.146,00	1	34.508.403,00	1	36.233.823,00	1	38.045.515,00	1	39.947.790,00	6	181.600.677,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya	
4.01.14	<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>					<b>Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>516</b>	<b>1500</b>	<b>5.206.676.604,00</b>	<b>1500</b>	<b>5.470.160.435,00</b>	<b>1500</b>	<b>5.743.668.456,00</b>	<b>1500</b>	<b>6.030.851.878,00</b>	<b>1500</b>	<b>6.332.394.472,00</b>	<b>7500</b>	<b>28.786.751.845,00</b>	<b>Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya</b>	<b>Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	
4.01.14.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Dokumen	4	4	2.441.161.513,00	4	2.563.219.589,00	4	2.691.380.568,00	4	2.825.949.596,00	4	2.967.247.076,00	20	13.488.958.342,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya	
4.01.14.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Dokumen	4	4	1.953.790.571,00	4	2.051.480.100,00	4	2.154.054.105,00	4	2.261.756.810,00	4	2.374.844.650,00	20	10.795.926.236,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya	
4.01.14.3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan					Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dokumen	4	4	814.724.520,00	4	855.460.746,00	4	898.233.783,00	4	943.145.472,00	4	990.302.746,00	16	4.501.867.267,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya	
4.01.2	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAN RAKYAT</b>					<b>Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>12.886.620.220,04</b>	<b>100</b>	<b>13.530.951.231,04</b>	<b>100</b>	<b>14.207.498.792,60</b>	<b>100</b>	<b>14.917.873.732,23</b>	<b>100</b>	<b>15.654.767.418,84</b>	<b>100</b>	<b>71.206.711.394,75</b>	<b>Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya</b>		
4.01.2.01	<b>Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan</b>					<b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>2.007.944.710,00</b>	<b>100</b>	<b>2.108.341.946,00</b>	<b>100</b>	<b>2.213.759.043,00</b>	<b>100</b>	<b>2.324.446.995,00</b>	<b>100</b>	<b>2.431.669.345,00</b>	<b>100</b>	<b>11.095.162.039,00</b>	<b>Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya</b>		
4.01.2.01.1	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	2	11	561.431.757,00	11	589.503.345,00	11	618.978.512,00	11	649.927.438,00	11	682.423.810,00	55	3.102.264.862,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya	
4.01.2.01.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	9	3	761.434.093,00	3	799.505.798,00	3	839.481.088,00	3	881.455.142,00	3	925.527.899,00	15	4.207.404.020,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya	
4.01.2.01.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	8	5	685.078.860,00	5	719.332.803,00	5	755.299.443,00	5	793.064.415,00	5	832.717.636,00	25	3.785.493.157,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya	



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029**

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4	012202	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	8.044.787.651,04	100	8.447.027.033,04	100	8.869.378.385,60	100	9.312.847.304,23	100	9.778.489.668,84	100	44.452.530.042,75	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	
4	012202001	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	4	4	1.812.990.506,00	4	1.903.640.031,00	4	1.998.822.033,00	4	2.098.763.135,00	4	2.203.701.291,00	20	10.017.916.996,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
4	012202002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	3	3	270.944.630,00	3	284.491.862,00	3	298.716.455,00	3	313.652.277,00	3	329.334.891,00	15	1.497.140.115,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
4	012202003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	3	3	5.960.852.515,04	3	6.258.895.140,04	3	6.571.839.897,60	3	6.900.431.892,23	3	7.245.453.486,84	15	32.937.472.931,75	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
4	012203	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	%	100	100	891.785.637,00	100	936.374.919,00	100	983.193.664,00	100	1.032.353.348,00	100	1.083.971.016,00	100	4.927.678.584,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	
4	0122031	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	1158	900	400.402.404,00	910	420.422.524,00	920	441.443.650,00	930	463.515.833,00	940	486.691.625,00	4600	2.212.476.036,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
4	0122032	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	3	2	290.400.000,00	2	304.920.000,00	2	320.166.000,00	2	336.174.300,00	2	352.983.015,00	10	1.604.643.315,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
4	0122033	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	800	825	200.983.233,00	825	211.032.395,00	825	221.584.014,00	825	232.663.215,00	825	244.296.376,00	4125	1.110.559.233,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
4	012204	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kegiatan	20	30	1.942.102.222,00	35	2.039.207.333,00	40	2.141.167.700,00	45	2.248.226.085,00	50	2.360.637.389,00	200	10.731.340.729,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	
4	0122041	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	12	12	1.776.102.222,00	12	1.864.907.333,00	12	1.958.152.700,00	12	2.056.060.335,00	12	2.158.863.351,00	60	9.814.085.941,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029**

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.012.004.20	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	0	1	66.000.000,00	1	69.300.000,00	1	72.765.000,00	1	76.403.250,00	1	80.223.413,00	5	364.691.663,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
4.012.004.23	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	1	1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	110.250.000,00	1	115.762.500,00	1	121.550.625,00	5	552.563.125,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
4.013.000.000	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan dan Pembangunan</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.794.118.764,40</b>	<b>100</b>	<b>1.883.824.702,62</b>	<b>100</b>	<b>1.978.015.937,75</b>	<b>100</b>	<b>2.076.916.734,63</b>	<b>100</b>	<b>2.180.762.571,37</b>	<b>100</b>	<b>9.913.638.710,77</b>	<b>Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya</b>	
4.013.001.20	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>446.893.961,32</b>	<b>100</b>	<b>469.238.659,39</b>	<b>100</b>	<b>492.700.592,36</b>	<b>100</b>	<b>517.335.621,97</b>	<b>100</b>	<b>543.202.403,07</b>	<b>100</b>	<b>2.469.371.238,11</b>	<b>Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya</b>	
4.013.001.11	Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD, dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monev Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	1	1	92.193.396,08	1	96.803.065,88	1	101.643.219,18	1	106.725.380,13	1	112.061.649,14	5	509.426.710,41	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
4.013.001.12	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	2	1	144.994.810,12	1	148.744.550,63	1	152.931.778,16	1	157.578.367,07	1	162.707.285,42	5	766.956.791,40	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
4.013.001.13	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	1	1	159.705.755,12	1	160.691.042,88	1	162.125.595,02	1	164.031.874,77	1	166.433.468,51	5	812.987.736,60	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
4.013.001.16	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPKAD	Dokumen	n/a	n/a	50.000.000,00	2	63.000.000,00	2	76.000.000,00	2	89.000.000,00	2	102.000.000,00	8	380.000.000,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
4.013.002.20	<b>Kegiatan Pelaksanaan Administrasi dan Pembangunan</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kebijakan Administrasi dan Pembangunan</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>273.052.259,36</b>	<b>100</b>	<b>286.704.872,34</b>	<b>100</b>	<b>301.040.115,94</b>	<b>100</b>	<b>316.092.121,75</b>	<b>100</b>	<b>331.896.727,83</b>	<b>100</b>	<b>1.508.786.097,22</b>	<b>Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya</b>	
4.013.002.11	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Laporan	1	1	145.777.575,12	1	153.066.453,88	1	160.719.776,57	1	168.755.765,40	1	177.193.553,67	5	805.513.124,64	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
4.013.002.12	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	1	1	46.762.961,12	1	49.101.109,18	1	51.556.164,63	1	54.133.972,87	1	56.840.671,51	5	258.394.879,31	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
4.013.002.23	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	1	1	80.511.723,12	1	84.537.309,28	1	88.764.174,74	1	93.202.383,48	1	97.862.502,65	5	444.878.093,27	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
4.013.003.20	<b>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Jumlah Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>OPD</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>582.797.218,36</b>	<b>37</b>	<b>611.937.079,29</b>	<b>37</b>	<b>642.533.933,24</b>	<b>37</b>	<b>674.660.629,91</b>	<b>37</b>	<b>708.393.661,40</b>	<b>185</b>	<b>3.220.322.522,20</b>	<b>Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya</b>	
4.013.003.11	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	34	85	151.102.447,12	90	158.657.569,48	95	166.590.447,95	100	174.919.970,35	105	183.665.968,86	475	834.936.403,76	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**  
**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029**

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		Data Capaian pada Tahun Awal Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
		Indikator	Satuan		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4	01320002	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	3	3	282.320.106,12	3	296.436.111,43	3	311.257.917,00	3	326.820.812,85	3	343.161.853,49	15	1.559.996.800,89	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
4	01320003	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	150	150	149.374.665,12	175	156.843.398,38	200	164.685.568,29	225	172.919.846,71	250	181.565.839,05	1000	825.389.317,55	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
4	01320004	<b>Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	%	100	100	491.375.325,36	100	515.944.091,60	100	541.741.296,21	100	568.828.361,00	100	597.269.779,07	100	2.715.158.853,24	<b>Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya</b>	
4	01320004	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	1	1	242.011.503,12	2	254.112.078,29	2	266.817.682,19	2	280.158.566,30	2	294.166.494,61	9	1.337.266.324,51	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
4	01320004	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	1	1	126.924.109,12	2	133.270.314,58	2	139.933.830,30	2	146.930.521,82	2	154.277.047,91	9	701.335.823,73	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
4	01320004	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Data terkait penyusunan Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	1	1	122.439.713,12	1	128.561.698,73	1	134.989.783,72	1	141.739.272,88	1	148.826.236,55	5	676.556.705,00	Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten Kubu Raya
<b>Jumlah</b>							<b>70.274.887.426,82</b>		<b>73.788.631.798,15</b>		<b>77.478.063.388,08</b>		<b>81.351.966.557,47</b>		<b>85.419.564.885,35</b>		<b>388.313.114.055,87</b>		



**Tabel 4.3**  
**Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	<b>Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Meningkatnya Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	<b>Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
3	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	<b>Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	
			Sub Kegiatan Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
	<b>Dan Tanah Absentee</b>		Sub Kegiatan Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	
4	<b>Program Penetapan Tanah Ulayat</b>	<b>Meningkatnya Tata Kelola Tanah Ulayat</b>	<b>Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
5	<b>Program Pengelolaan Tanah Kosong</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Tanah Kosong</b>	<b>Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</b>	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	
6	<b>Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Izin Membuka Tanah</b>	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah</b>	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	
7	<b>Program Penatagunaan Tanah</b>	<b>Meningkatnya Tertib Pertanahan dan Kepastian Hukum bagi Pemegang Hak Atas Tanah</b>	<b>Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	
8	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
			<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	
			<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	
			Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
			Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			<b>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			<b>Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	
			Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
			Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
			<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
			Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
			Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
			<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
			Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	
<b>9</b>	<b>Program Pemerintahan dan</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Kebijakan</b>	<b>Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan</b>	
			Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
	<b>Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
			<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
			<b>Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	
			Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
			<b>Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	
Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				
<b>10</b>	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
			Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
			Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	
			<b>Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
			Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
			<b>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
			<b>Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	



#### 4.2. TARGET KINERJA RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya:

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua atau lebih mengukur indikator kinerja mempunyai kinerja yang sama.
3. Relevan, artinya indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil/manfaat, dan dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

Dari penjabaran diatas, Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:



- a. Tujuan
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
  2. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
- b. Sasaran
1. Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat
  2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
- Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Tahun 2025-2030**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (76,35)	BB (76,50)	BB (77,00)	BB (77,50)	BB (78,00)	A (80,01)	A (82,00)
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	BB (76,95)	BB (78,50)	BB (79,80)	BB (80,10)	BB (80,22)	BB (80,35)	BB (80,41)

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Daerah**  
**Tahun 2025-2030**

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Tahun						
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>										
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	87,12	87,51	88,10	88,25	88,50	89,10	89,50	
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>										
1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	87,12	87,51	88,10	88,25	88,50	89,10	89,50	
2	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	Rasio	1:515	1:505	1:538	1:573	1:610	1:649	1:691	
3	Persentase Kasus Tanah Negara	%	60,00	70,00	50,00	58,00	59,00	54,00	53,00	
4	Penyelesaian Izin Lokasi	%	100	100	100	100	100	100	100	

**Tabel 4.6**  
**Indikator Kinerja Kunci**  
**Tahun 2025-2030**

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Tahun						
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan</b>										
1	Persentase Pemanfaatan Tanah yang Sesuai dengan Peruntukkan Tanahnya di atas Izin Lokasi Dibandingkan dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan	Persen	98,34	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	0	100	100	100	100	100	100	
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan dalam Rangka Penanaman Modal	Persen	98,34	100	100	100	100	100	100	
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	-	-	-	-	-	-	-	



No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target Tahun						
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat	Persen	83,07	100	100	100	100	100	100	
6	Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi	Persen	41,66	33,33	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
<b>Sekretariat Daerah (Pengadaan)</b>										
1	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang Dibawa ke Tahun Berikutnya, yang Ditandatangani pada Kuartal Pertama	Persen	-	-	-	-	-	-	-	
2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif	Persen	1,10	25,97	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00	
3	Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan	Persen	52,15	12,01	13,50	14,00	14,50	15,00	15,50	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

**Tabel 4.7**  
**Formulasi Indikator Kinerja Kunci**

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Formulasi
1.	Pertanahan	Persentase Pemanfaatan Tanah yang Sesuai dengan Peruntukkan Tanahnya di atas Izin Lokasi Dibandingkan dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan	$\frac{\text{Luas Tanah Sesuai Peruntukkan Izin Lokasi}}{\text{Seluruh Luas Tanah yang Diberikan Izin Lokasi}} \times 100\%$
		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	$\frac{\text{Jumlah Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum}}{\text{Jumlah Kebutuhan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum}} \times 100\%$
		Tersedianya Lokasi Pembangunan dalam Rangka Penanaman Modal	$\frac{\text{Luas Tanah yang Telah Dimanfaatkan Sesuai Dengan Peruntukkannya Diatas Izin Lokasi}}{\text{Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan}} \times 100\%$
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	$\frac{\text{Jumlah Penerima Tanah Objek Landreform Dengan Luasan yang Diterima Lebih Besar Sama Dengan 0,5 Ha}}{\text{Jumlah Penerima Tanah Obyek Landreform}} \times 100\%$
		Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat	$\frac{\text{Luas Tanah yang Telah Dimanfaatkan Berdasarkan Izin Membuka Tanah}}{\text{Luas Izin Membuka Tanah yang Ditertibkan}} \times 100\%$
		Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Sengketa Tanah Garapan yang Ditangani}}{\text{Jumlah Pengaduan Sengketa Tanah Garapan}} \times 100\%$
2.	Pengadaan	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang Dibawa ke Tahun Berikutnya, yang Ditandatangani pada Kuartal Pertama	$\frac{\text{Jumlah Kontrak Infrastruktur Dengan Nilai Besar yang Perlu Pembangunan dalam 3 Kuartal yang Ditandatangani pada Kuartal Pertama Tahun n}}{\text{Jumlah Kontrak Keseluruhan Tahun n}} \times 100\%$
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif	$\frac{\text{Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif}}{\text{Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Tanpa Metode Kompetitif}} \times 100\%$
		Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan	$\frac{\text{Jumlah Nilai Belanja Langsung yang Melalui Pengadaan}}{\text{Total Belanja Langsung}} \times 100\%$



## BAB V

### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Sekretariat Daerah yang akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah tahunan. Penyusunan Rencana Strategis merupakan kegiatan dalam mencari tahu dimana organisasi berada saat ini, kemana arah yang harus dituju oleh organisasi dan bagaimana cara dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2025-2029 menjadi acuan bagi seluruh unsur/bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya, karena:

1. Merupakan alat yang bermanfaat untuk menilai pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya dan mengukur seberapa besar pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sepanjang tahun 2025-2029.
2. Memudahkan pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah pada akhir tahun periode renstra, karena dapat segera dilakukan perbandingan terbalik antara rencana dan realisasi dengan menggunakan lima indikator kinerja, yaitu: *input*, *output*, *outcomes*, *benefit* dan *impact*.

Kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah dengan mengoptimalkan sumber daya aparatur dan alokasi dana anggaran melalui pendekatan kinerja serta prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dan kehematan serta rasionalisasi, agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disamping itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya juga perlu menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan yang akuntabel dalam penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan keuangan.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUBU RAYA,**

**YUSRAN ANIZAM, S.Sos., M.Si.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 196906031989031005**